

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 52

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2002**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan sesuai dengan BAB V pada Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di atas maka pelaksanaannya harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b di atas maka untuk Tahun 2002 perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (Repetada) Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KOTA BANDUNG TAHUN 2002.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 merupakan pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2001
BAB III	:	PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002
BAB IV	:	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BAB V	:	PROGRAM/KEGIATAN KOTA BANDUNG TAHUN 2002
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 yang merupakan Lampiran dari Peraturan Daerah.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan penjabaran operasional dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2002 sehingga berfungsi sebagai acuan dari seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan pembangunan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Nopember 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran

Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang didorong melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah memberikan warna tersendiri dalam berbagai segi pembangunan Kota Bandung, mulai dari tingkat penentuan kebijaksanaan sampai dengan tingkat implementasinya disamping menimbulkan banyak peluang bagi Daerah, juga mengandung berbagai tantangan yang harus dijawab oleh segenap pelaku pembangunan Kota Bandung.

Pada satu sisi, di dalam paradigma Desentralisasi dan Otonomi Daerah terkandung peluang berupa *bargaining position* (posisi tawar) Pemerintah Kabupaten/Kota yang lebih besar dibandingkan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kewenangan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2001 semakin membuka kesempatan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan diversifikasi dan variasi pengelolaan pembangunan kota, sehingga dengan sendirinya dapat mendorong dinamika pembangunan Kota Bandung. Penyelenggaraan sejumlah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 itu antara lain ditandai dengan dibentuknya unit organisasi baru dan dihapusnya beberapa unit organisasi tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Sementara itu, paradigma Desentralisasi dan Otonomi Daerah pula menimbulkan berbagai tantangan yang pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan kewenangan-kewenangan itu, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan warga kota Bandung sendiri. Disamping itu aspek ketersediaan sumber-sumber daya pembangunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai modal dasar pembangunan Kota Bandung merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Walaupun dalam aktualisasi kewenangan tersebut disadari akan banyak dihadapi hambatan dan tantangan, namun keinginan dan motivasi yang kuat seluruh komponen pembangunan Kota Bandung untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kebijakan Otonomi Daerah saat ini perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, penanganan berbagai hambatan dan antisipasi tantangan lebih jauh dari Otonomi Daerah ini menjadi salah satu agenda strategis, khususnya guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bandung.

Dalam konteks Desentralisasi sebagaimana digambarkan diatas, maka sangat penting bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengedepankan pula prinsip pemerintahan yang antisipatif disamping prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini merupakan wujud dari sikap pemerintah yang mampu memprediksi secara spesifik gejala-gejala perubahan pada masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan semakin

meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan Kota yang antisipatif ini secara umum menggambarkan suatu profil pemerintahan kota yang tanggap, peduli, dan menaruh perhatian pada kelangsungan pembangunan kota itu sendiri (*concerns to the sustainability of city building*). Oleh karena itu, perhatian terhadap kelangsungan pembangunan Kota Bandung akan sangat bergantung kepada seberapa jauh kemauan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara rasional serta tindakan-tindakan kebijaksanaannya yang akan ditempuh dengan mempertimbangkan kemampuan Kota Bandung.

Pada tingkatan operasional pembangunan Kota Bandung yang memiliki visi mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang “*Genah, Merenah, Tumaninah*” merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh segenap komponen pembangunan Kota Bandung. Visi GMT yang merupakan kristalisasi dari kehendak masyarakat Kota Bandung harus diaktualisasikan melalui analisis situasi yang cermat, pola pendekatan dan strategi yang tepat, dan kebersamaan serta keterpaduan dalam satu komitmen pembangunan yang kuat.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi kota tersebut, Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004 telah didisain sebagai landasan operasional dan arah pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dalam Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung tersebut telah ditetapkan beberapa agenda strategis yang terdiri dari : (1) rehabilitasi kondisi sosial ekonomi kota; (2) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; (3) pengembangan jaringan infrastruktur kota; (4) pengembangan kesempatan kerja dan berusaha; (5) reformasi birokrasi pemerintahan; (6) peningkatan keuangan daerah; (7) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (8) peningkatan manajemen transportasi kota; (9) pembinaan sektor informal; (10) penanganan permukiman kumuh; dan (11) persiapan pelaksanaan otonomi daerah.

Seluruh agenda strategis tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk program kegiatan yang memiliki indikasi jelas dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mencapai sasaran baik secara fungsional maupun secara administratif. Indikasi kegiatan dalam setiap program kegiatan setiap tahun itu pula harus dapat mencapai kriteria yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja setiap program. Dengan demikian, sasaran program yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui pendekatan indikatif yang signifikan dengan kepentingan masing-masing program.

Dalam proses menuju kearah sasaran masing-masing program, maka setiap unit kerja pengelola program harus mencermati secara komprehensif dua aspek utama penyelenggaraan program yang terdiri dari : (1) indikasi kegiatan yang harus dimiliki dalam setiap program; dan (2) indikator kinerja yang harus dicapai oleh setiap program. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 yang telah terkandung indikasi kegiatan dan indikator kinerja yang harus diimplementasikan secara nyata oleh segenap pengelola pembangunan Kota Bandung. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) ini harus pula dijadikan acuan pokok dalam mekanisme perencanaan pembangunan selanjutnya, mulai dari tingkat komunitas, Kelurahan, Kecamatan, sampai dengan Unit-unit Kerja di tingkat Kota.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 merupakan dokumen perencanaan yang lebih bersifat operasional, berisi pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan dalam bentuk prioritas.

Kedudukan dan fungsi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 ini merupakan penjabaran operasional dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004 dan berfungsi sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Mengingat sifat operasional dari Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 ini, maka penetapan Repetada ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan pokok bagi segenap komponen pembangunan Kota Bandung, baik pada tingkat penentu kebijakan (*decision maker*), tingkat penanggung jawab program, tingkat pelaksana teknis, maupun kalangan supra-struktur lainnya yang pada dasarnya harus menjadi subyek pembangunan.

Dengan demikian, setelah tersusunnya acuan pokok penyelenggaraan pembangunan di Kota Bandung ini, diharapkan terbangun komitmen antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif dalam menjalankan proses pembangunan Kota Bandung “secara baik dan benar” sehingga mampu mewujudkan *Good Governance*, dan lebih jauh yaitu terwujudnya visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang *Genah, Merenah, Tumaninah*.

1.3. Sistematika

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 ini memiliki sistematika dan ruang lingkup sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, memuat dasar pemikiran serta maksud dan tujuan ditetapkannya Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002, yang didalamnya dijelaskan garis-garis besar tentang visi dan misi Kota Bandung yang diuraikan melalui pendekatan normatif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2000, yang merupakan ringkasan dari hasil-hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan terhadap implementasi kebijaksanaan dalam berbagai dokumen perencanaan, serta hasil evaluasi terhadap operasional program pembangunan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2000.
- Bab III : Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2002, memuat deskripsi serta matriks program dan indikasi prioritas pembangunan yang harus terselenggara pada Tahun 2002, sebagai acuan bagi perangkat Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyusun usulan rencana pembangunan pada setiap unit kerja sesuai dengan kewenangan Kota Bandung dan kewenangan serta tugas pokok masing-masing unit kerja.

- Bab IV : Pelaksanaan Pembangunan, berisi arahan tentang pengelolaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Kota Bandung, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dan manajemen pelaksanaan pembangunan untuk selama kurun waktu Tahun 2002.
- Bab V : Penutup, memuat ikhtisar/rangkuman mengenai substansi yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002.

B A B II

EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2000 DAN 2001

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2000

Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan langkah yang mutlak harus dilaksanakan, karena maksud dari evaluasi adalah untuk mengadakan pengukuran terhadap penyelenggaraan sesuatu kegiatan terutama setelah semuanya selesai.

Berbagai kondisi yang ditemukan dari evaluasi baik dari aspek keberhasilan maupun kekurangannya dapat dijadikan feed back bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya dan kompleksitas dari pelaksanaan evaluasi sangat tergantung kepada berbagai kebijakan dan program yang telah ditentukan.

Penentuan program-program yang akan dikupas dalam Buku Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) untuk tahun anggaran 2001, selain berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan yang telah tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004, juga didasarkan pula kepada hasil evaluasi dan pengendalian tahun-tahun sebelumnya, terutama hasil pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2000 dan tahun anggaran 2001. Akan tetapi karena pelaksanaan program proyek tahun anggaran 2001 belum selesai, maka evaluasi program proyek tahun anggaran 2001 lebih bersifat evaluasi terhadap progres proyek.

Untuk melaksanakan berbagai sasaran, kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan selama tahun 2000 Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana melalui Pos Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 90.096.577.927,62 (setelah perubahan). Jumlah anggaran tersebut diperuntukan bagi 10 Bidang Pembangunan, 19 Sektor, 56 Program serta 260 kegiatan/proyek. Dan Realisasinya setelah diperhitungkan adalah sebesar RP. 82.541.652.022,64 atau sekitar 91,61%. Sebagai hasil pelaksanaan tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2000

II.1.1 Pembangunan Kualitas Sumber Daya manusia.

1.A. Pembangunan Bidang Agama

Selama Tahun Anggaran 2000, Pembangunan Bidang Keagamaan diselenggarakan melalui 2 (dua) buah program pembangunan, yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama.
2. Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji.

Seluruh Program Pembangunan yang tercakup dalam bidang agama ini didukung oleh anggaran pembangunan sebesar Rp. 1.645.000.000,- dan terleasisasi sebesar Rp.1.639.327.500,- (99,66%).

Program peningkatan sarana kehidupan beragama, dilaksanakan melalui proyek-proyek :

- Proyek peningkatan sarana dan kegiatan keagamaan;
- Proyek pembinaan keagamaan bagi keluarga anggota KORPRI.
- Proyek Pembangunan Pondok Pesantren Saritem.
- Proyek Penunjang kegiatan sarana dan kegiatan keagamaan.
- Proyek Penataan Mesjid Agung.

Sebagai hasil dari pelaksanaan proyek-proyek tersebut diantaranya adalah telah tersalurkannya bantuan terhadap 162 sarana keagamaan dan 35 paket prasarana peribadatan, disamping itu telah terbangunnya Pondok Pesantren “Dharul Attaubah” sebagai salah satu kebutuhan dalam upaya penataan kawasan Saritem yang pada gilirannya akan dapat mendorong perubahan kondisi lingkungan dan kondisi sosial kawasan saritem yang bebas dari praktek praktek prostitusi. Kemudian dengan tersedianya sarana dan prasarana peribadatan yang memadai diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan warga Kota Bandung.

Pada sisi kerukunan hidup umat beragama, selama ini telah terselenggara forum silaturahmi antar umat beragama yang merupakan suatu usaha meredam dan mencegah terjadinya tindakan anarkis terutama yang berkaitan dengan masalah SARA.

Program peningkatan pelayanan Ibadah Haji, dilaksanakan melalui proyek lanjutan pembangunan wisma haji. Dengan proyek ini maka masyarakat Kota Bandung yang memeluk Agama Islam telah dapat memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan pembinaan Ibadah Haji.

Hasil Kinerja Pemerintah Kota Bandung selama tahun anggaran 2000, disadari belum menunjukkan hasil yang optimal. Indikasi dari kondisi seperti ini ditunjukkan dengan masih adanya perilaku masyarakat yang cenderung menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku di masyarakat Kota Bandung seperti masih maraknya praktek-praktek perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan narkotika yang merupakan kondisi aktual yang harus ditangani secara sungguh-sungguh bahkan belakangan ini modus operandi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika telah mulai merambah ke lingkungan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, termasuk lingkungan Sekolah Dasar.

II.2.2. Pembangunan Bidang Ekonomi.

Pembangunan Bidang Ekonomi pada tahun 2000, diselenggarakan melalui program-program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah.
- b. Program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu.
- c. Program Pembangunan Usaha Pertanian.
- d. Program Pembangunan Peternakan.
- e. Program Pembangunan Usaha Peternakan.
- f. Program Pembangunan Usaha Pribanan.
- g. Program Pembangunan Perdagangan dan Sistem Distribusi.
- h. Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan.
- i. Program Pengembangan Koperasi.
- j. Program Pembinaan Usaha Kecil.

Pembangunan bidang ekonomi Kota ini telah menghabiskan dana sebesar Rp.6.634.183.682,62 dari alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 6.653.051.427,62 (99,72%).

- a. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 5 Proyek yang titik beratnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri. Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah meningkatkannya kualitas produk-produk industri rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan pelaku industri rumah tangga, kecil dan menengah.
- b. Program Pembangunan Pertanian Rakyat Terpadu, dilaksanakan melalui 7 Proyek. Hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya produktifitas lahan pertanian dan meningkatnya kawasan ruang terbuka hijau.
- c. Program Pembangunan Usaha Pertanian, dilaksanakan melalui 1 (satu) proyek yaitu Perencanaan Pembangunan Agrobisnis di Kota Bandung. Hasil dari Program ini adalah telah tersedianya pedoman pembangunan pertanian perkotaan yang berorientasi pada agrobisnis.
- d. Program Pembangunan Usaha Peternakan, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Proyek. Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah terawasinya kualitas produk peternakan serta terbinanya kelompok budidaya peternak.
- e. Program Pembangunan usaha Perikanan, dilaksanakan melalui 6 (enam) Proyek. Hasil yang telah dicapai adalah terawasinya kualitas produk perikanan serta terbinanya kelompok budidaya perikanan.
- f. Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi dilaksanakan melalui 3 (tiga) Proyek. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan proyek tersebut adalah telah tersedianya sarana perdagangan yang memadai.
- g. Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Proyek, Hasil yang dicapai adalah telah tersalurkannya modal kepada BUMN yaitu sebesar Rp. 3.173.772.427,62 sehingga dapat meningkatkan modal BUMD.
- h. Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan melalui 4 Proyek yang titik beratnya untuk menguatkan modal pada koperasi. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Pembinaan Usaha Kecil dilaksanakan melalui Proyek Kegiatan PelayananPra kulaifikasi TDR Hasil yang dicapai adalah terinventarisasinya data-data perusahaan yang berskala kecil dan menengah.

II.1.3. Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota.

Pembangunan Kota Bandung di Bidang Sosial Budaya diselenggarakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pembinaan Pendidikan Dasar.
2. Program Pendidikan Kebahasaan, Kesusastraan dan Kepustakaan.

3. Program Pelayanan Kesehatan, Rujukan dan Rumah Sakit.
4. Program Perbaikan Gizi.
5. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.
6. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial.
7. Program Penanggulangan Bencana Alam.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya.
9. Program Pemasaran Pariwisata.
10. Program Pengembangan Produk Wisata.
11. Program Pengembangan Telekomunikasi Daerah.
12. Program Perananan Wanita.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Program-Program Bidang Sosial Budaya tersebut telah menyerap dana Rp. 12.965.751.909,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 13.211.380.000,- (98,14%), dengan program yang mendukung sebagai berikut :

1. Program pembinaan Pendidikan Dasar didukung oleh 8 Proyek Pembangunan dengan telah memberikan hasil :
 - a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya pada 7 (tujuh) buah Sekolah Dasar 2 (dua) buah Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Hasil yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada kelancaran proses kegiatan belajar mengajar yang akan berdampak pada semakin meningkatnya kecerdasan dan keterampilan siswa.
 - b. Terbinanya SD Induk Pendidikan Pengembangan Olah Raga (SD IPPOR) dan SD Induk Pengembangan Kesenian (SD IPK) melalui pengadaan alat-alat olah raga prestasi dan alat-alat kesenian. Hal ini di masyarakat dapat dimanfaatkan, khususnya oleh siswa untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuan Olah Rga dan kesenian sehingga akan mendorong motivasi siswa akan melestarikan seni budaya dan mengembangkan bakat dan kemampuannya.
 - c. Tergabungnya 92 SD menjadi 45 SD yang akan bermanfaat, bagi terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan dasar, dampak yang ditimbulkan dari program ini antara lain semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar dan semakin dapat ditekannya kebutuhan-kebutuhan operasional Sekolah Dasar.
2. Program Pembinaan Kebahasaan, Kesusastraan dan Kepustakaan yang didukung oleh 2 Proyek Pembangunan dengan hasil yang dicapai antara lain:
 - a. Terlatihnya 28 orang pengelola perpustakaan pada 28 Desa/Kelurahan di Kota Bandung.
 - b. Terlaksananya mobilitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
 - c. Bertambahnya koleksi buku bacaan pada 10 Desa/Kelurahan masing-masing diberi buku 100 judul buku bacaan per Kelurahan.
 - d. Terselenggaranya aktivitas kegiatan Gelanggang Generasi Muda (GGM) dalam rangka Pembinaan Generasi Muda.

Manfaat dan dampak yang didapat dari program antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang akan semakin mendorong kelancaran pelayanan perpustakaan.
 - b. Kebutuhan buku-buku bacaan semakin dapat diperoleh secara mudah dan murah, sehingga akan mendorong motivasi dan semangat budaya membaca di kalangan masyarakat.
3. Program Pelayanan Kesehatan, Rujukan dan Rumah Sakit didukung oleh 16 Proyek Pembangunan dengan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya sarana dan prasarana operasional pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b. Terbinanya kesehatan dan Gizi masyarakat serta upaya-upaya kearah peningkatan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - c. Terlayannya kesehatan dan pengobatan penyakit kepada masyarakat kurang mampu.

Adapun manfaat dan dampak dari proyek ini di masyarakat terlayannya seluruh masyarakat dalam memelihara kesehatan dan melakukan pengobatan penyakit.

4. Program Perbaikan Gizi didukung melalui proyek PMT-AS dengan hasil yang dicapai melalui proyek-proyek ini adalah tidak terjadinya masalah kekurangan Gizi pada 6000 Siswa pada 33 SD/MI, sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari program/proyek ini semakin mementingkan mutu kesehatan siswa tersebut yang akan berdampak pada peningkatan kecerdasan siswa yang bersangkutan.
5. Program Pelatihan dan Peningkatan keterampilan Tenaga Kerja diselenggarakan melalui 2 buah proyek yaitu :
- Proyek latihan keterampilan kerja bagi penganggur/pencari kerja.
 - Proyek bantuan kegiatan ketenaga kerjaan/KS tripartit.

Dengan hasil yang telah dicapai oleh kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengurus dan pekerja di perusahaan swasta dengan harapan manfaat yang dicapai adalah perusahaan-perusahaan swasta dapat membenahi administrasinya.

6. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial didukung oleh 4 buah kegiatan proyek yaitu :
- Proyek Pembinaan Sosial Masyarakat.
 - Proyek Penunjang Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Program JPS.
 - Proyek Penunjang CDS.
 - Proyek Peningkatan Sosial Terpadu.

Program Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program serta manfaat dan dampak dari hasil kegiatan ini adalah

- Meningkatnya kerjasama organisasi sosial kemasyarakatan dengan pemerintah daerah dalam membina kerukunan kehidupan beragama.
- Meningkatnya kinerja program JPS.
- Tersusunnya strategi pengembangan Kota yang partisipatif.
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Program penanggulangan Bencana Alam yang diaktualisasikan melalui proyek penanggulangan masalah sosial 6 Bencana Alam, adapun yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut adalah terlayannya kebutuhan masyarakat miskin terlantar yang berdampak pada semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin, terlantar tertanggulangnya kejadian bencana alam dan tersedianya perlengkapan penanggulangan bencana alam yang berdampak pada peningkatan kesiap siagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya bencana alam.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya mencakup pada 2 kegiatan proyek yaitu,
 - Proyek Peningkatan Sarana dan kegiatan budaya.
 - Proyek lanjutan pembangunan gedung pramuka kwarcab Kota Bandung.

Adapun Hasil yang telah dicapai adalah.

- a. Tersedianya sarana penunjang kegiatan kebudayaan dan kepramukaan.
 - b. Lestarinya kebudayaan Daerah dan peningkatan kegiatan kepramukaan.
 - c. Meningkatnya pengenalan kebudayaan daerah dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
9. Program pemasaran Pariwisata didukung oleh 3 (tiga) buah kegiatan proyek pembangunan yaitu.
 - Proyek penyelenggaraan event tetap kepariwisataan .
 - Proyek pemasaran langsung di bursa pariwisata nasional dan internasional.
 - Proyek kegiatan kepariwisataan.

Dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatnya frekwensi kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

10. Program Pengembangan Produk Wisata yang diaktualisasikan melalui proyek bantuan modal pengemasan dan pementasan Budaya Daerah dengan hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya kualitas pengemasan dalam pementasan budaya daerah yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan PAD.
11. Program pengembangan telekomunikasi daerah yang didukung oleh proyek bantuan pelatihan kepariwisataan dalam dan luar negeri dengan hasil yang telah dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata sehingga mampu berperan sebagai misionaris seni budaya Kota Bandung.
12. Program Peranan Wanita yang diaktualisasikan melalui Proyek Peningkatan Peranan Perempuan yang meliputi kegiatan :
 - Pelatihan kepemimpinan Wanita.
 - Peningkatan peranan wanita dalam proses pembangunan.
 - Bantuan kepada persatuan para istri purnawirawan.

Adapun hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tersebut adalah meningkatkan kegiatan organisasi wanita dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial sedangkan manfaat yang diharapkan timbul dari program ini terdorongnya penyempurnaan pengelolaan organisasi wanita sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara optimal serta semakin terdepannya kaum wanita dalam memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan keluarga.

13. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda yang diaktualisasikan dalam proyek peningkatan prestasi pemuda dan Olah Raga dengan hasil yang telah dicapai oleh kegiatan ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana olah raga dan berjalannya kegiatan kepemudaan.

II.1.4. Penataan Kota

4.1. Tata Ruang Dan Infrastruktur

Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur diarahkan pada upaya meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pada Tahun 2000, diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penataan Ruang
2. Program Penataan Pertanahan
3. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian jembatan
5. Program Pembangunan Fasilitas Lalulintas jalan
6. Program Pengelolaan sungai, danau dan sumber air lainnya
7. Program Pengembangan dan pengelolaan saluran air irigasi
8. Program Penyediaan perumahan dan permukiman
9. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
10. Program Penataan Bangunan

Pembangunan Bidang tata Ruang dan Infrastruktur menghabiskan dana sebesar Rp 33.527.520.000.

1. Program Penataan ruang dilaksanakan melalui 3 (tiga) proyek yaitu : Digitasi peta Dasar, Pembelian peralatan Pemetaan Kota, dan Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut :
 - Evaluasi Peta Dasar Kota Skala 1 : 1000,
 - Tersedianya Peralatan Pemetaan
 - Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penataan Ruang secara berkelanjutan

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Program Penataan Ruang Daerah, adalah sebagai berikut :

- Tersedianya pedoman untuk pembuatan peta dasar Kota Bandung,
- Tersedianya data yang akurat sesuai dengan kondisi sekarang,
- Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya.

Dampak dari pelaksanaan program ini adanya keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, guna mendukung terwujudnya kondisi yang kondusif bagi penciptaan peluang investasi di Kota Bandung.

2. Program Penataan Pertanahan bertujuan untuk memperoleh tertib administrasi pertanahan dan mendukung pengadaaan sarana dan prasarana pelayanan umum khususnya penagadaan tanah untuk fasilitas umum, yaitu melalui kegiatan proyek pembelian/pembebasan tanah dan bangun, proyek pembinaan keagrariaan, proyek pensertifikatan tanah ex Desa penyerahan dari Kabupaten Bandung sesuai dengan PP No 16 tahun 1988 dan proyek pengukuran, Pematokan dan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah kota Bandung,

Adapun manfaat dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas umum dan terciptanya dan terciptanya teertib administrasi pertanahan baik tanah ex desa maupun tanah-tanh milik Pemerintah Kota Bandung.

Dampak dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan Terwujudnya tertib adiminstrasi pertanahan milik pemerintah kota Bandung.

3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pelaksanaan program ini adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi jalan-jalan yang ada di wilayah kota Bnaudng, adapun program ini dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) Kegiatan Proyek.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kinerja prasarana transportasi darat.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya aktivitas perekonomian kota dan daya tarik kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata.

4. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas prasarana transportasi kota. Pelaksanaan program ini dikelola melalui kegiatan-kegiatan proyek yaitu ; proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, peningkatan jalan Gede Bage Selatan, Proyek peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan aspal, proyek penunjang peningkatan jalan dan jembatan dan proyek pengadaan peralatan perlengkapan dan perbaikan laboratorium UPTP – PBK.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kinerja prasarana transportasi darat. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program ini adalah terjadinya peningkatan daya tarik kota.

5. Program pengembangan Fasilitas Lalu Lintas.
Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan sarana transportasi kota, program ini dikelola melalui kegiatan 9 (sembilan) proyek.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah terpelihara dan meningkatnya fungsi berbagai sarana penunjang lalu lintas dan angkutan umum.

Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kinerja berbagai sarana lalu lintas dan angkutan umum serta terminal untuk menunjang daya tarik kota.

6. Program Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber air lainnya.
Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja prasarana penggelontoran kota. Pelaksanaan program ini dikelola melalui kegiatan-kegiatan proyek : Penanggulangan Akibat Bencana Alam Sungai / saluran, Penataan Kali Cikapundung, Penataan Kali disekitar Kawasan Lingkungan Industri Kecil dan Gede Bage dan Proyek Pemeliharaan dan Peningkata prasarana pengelontoran Kota.

Hasil dari pelaksanaan program ini adalah terpeliharanya sungai / kali yang melintasi Kota Bandung dari bencana banjir.

Manfaat dari pelaksanaan program ini meliputi; meningkatnya kinerja prasarana penggelontoran kota dan berkurangnya banjir di sebagian wilayah Kota. Dampak dari program ini adalah terciptanya rasa aman masyarakat dari gangguan adanya bencana banjir pada musim penghujan.

7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Irigasi.

Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas saluran irigasi, pelaksanaannya dikelola oleh kegiatan Proyek perbaikan prasarana irigasi dan proyek pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program ini adalah terpeliharanya saluran-saluran irigasi yang menunjang pertanian di Kota Bandung.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah meningkatnya kinerja prasarana irigasi. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program ini adalah terjamahnya debit air yang dibutuhkan sektor pertanian.

8. Program Penyediaan Perumahan dan Pemukiman

Program ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan ketersediaan perumahan dan pemukiman layak dan nyaman huni, pelaksanaan program ini melalui proyek perbaikan perumahan dan pemukiman. Hasil dari pelaksanaan proyek ini meliputi pekerjaan saluran dan brandgang sepanjang 1.100 M. Dan pembangunan saluran drainase sepanjang 525 M.

Manfaat dari kegiatan ini terbentuknya kawasan pemukiman sehat dan layak huni, Dampak yang ditimbulkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

9. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih

Program ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan cakupan air bersih bagi masyarakat. Pelaksanaan program ini melalui 2 (dua) kegiatan proyek yaitu; penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dan pembuatan sumur artesis di Rumah Sakit Ujung Berung.

Hasil pelaksanaan program ini adalah tersedianya sarana air bersih. Manfaat program ini : meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

10. Program Penataan Pembangunan

Program ini di aplikasikan ke dalam 5 (lima) proyek, yaitu; Penunjang operasional/perencanaan bangunan dan pengujian bahan/ konstruksi penunjang operasional penertiban bangunan, penunjang dan penataan perencanaan kawasan kumuh, proyek penunjang PASPATI, dan penunjang perbaikan perumahan dan pemukiman.

Hasil dari pelaksanaan proyek meliputi, tersedianya konsep penataan bangunan dan sosialisasi penataan bangunan yang di harapkan memberikan manfaat bagi terbentuknya kawasan pemukiman sehat dan layak huni. Dampak yang di harapkan muncul adalah meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman warga Kota Bandung sehingga dapat mendorong semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

4.2. Lingkungan Hidup.

Program pembangunan lingkungan hidup di arahkan pada upaya meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan melalui upaya-upaya konservasi, rehabilitasi kawasan dan penggunaan sumber daya alam. Secara bijaksana dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Bidang lingkungan di dukung 5 (lima) program pembangunan yaitu :

1. Program Pengembangan dan Konservasi sumber Daya Air
2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Program pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
4. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
5. Program Inventarisaidan Evaluasi Sumber Daya Darat

Keseluruhan proyek yang dikelola adalah 24 proyek dengan total anggaran sebesar Rp.2.657.032.000,-

1. Program Pengembangan dan Konservasi sumber Daya Air

Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk pemeliharaan dan peningkatan sumber mata air sebagai bahan baku air bersih bagi masyarakat. Program ini di laksanakan melalui proyek pemeliharaan dan peningkatan sumber mata air. Hasil yang di peroleh dari pelaksanaan program ini adalah pemeliharaan dan peningkatan sumber-sumber mata air yang di jadikan sebagai bahan baku suplay air bersih bagi masyarakat.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah terpeliharanya sumber-sumber mata air baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dampak dari pelaksanaan program ini adalah terjaminnya kesediaan dan suplay air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk penyediaan dan pemeliharaan berbagai sarana/ fasilitas sosial dan fasilitas umum (FASOS/FASUM) dan taman-taman kota, inventarisasi/ pemetaan sumber-sumber pencemaran dan penyebaran informasi lingkungan kepada masyarakat, pelaksanaan program ini di kelola melalui 13 (tiga belas) proyek. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya berbagai sarana/ fasilitas sosial dan fasilitas umum (FASOS/FASUM) dan taman-taman kota, terinventarisasinya sumber-sumberpencemaran dan tersebarnya informasi lingkungan kepada masyarakat.

Manfaat program ini yaitu tersedianya fasos dan fasum yang memadai dan terjaganya kualitas lingkungan dan keindahan kota.

Dampak program ini adalah terciptanya keindahan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan kota yang dapat meningkatkan daya tarik kota.

3. Program pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk mengawasi, mengendalikan dan menaggulangi berbagai dampak lingkungan. Pelaksanaan program ini dikelola melalui 9 (sembilan) proyek.

Hasil yang di capai adalah terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup dan terselenggaranya penyuluhan kepada generasi muda.

Manfaat dari pelaksanaan program ini adalah terpantaunya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran terhadap lingkungan.
Dampak yang di timbulkan dari pelaksanaan program ini adalah terjaganya kualitas lingkungan hidup.

4. Program Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pelaksanaan program ini di kelola melalui kegiatan 2 (dua) proyek yaitu ; Proyek penyempurnaan IPAL dan Pembuatan Tangga RUPM, RSU Ujung Berung dan Proyek Penyehatan Lingkungan.
Hasil yang dicapai, tersedianya sarana pengolahan limbah cair, terpasangnya sarana pembuangan air kotor, sedangkan manfaat dan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
5. Program Inventarisaidan Evaluasi Sumber Daya Darat
Pelaksanaan program ini merupakan upaya untuk menginventarisasi dan mengevaluasi kualitas lingkungan yang di lakukan secara periodik dan terus menerus. Pelaksanaan program ini di laksanakan melalui proyek penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Hasil yang di capai adalah tersusunya dokumen neraca kualitas lingkungan kota Bandung yang berisi berbagai informasi berkaitan dengan parameter-parameter dan besaran-besaran yang dapat di jadikan sebagai tolok ukur kualitas lingkungan kota.

Manfaat program ini adalah terpataunya kualitas lingkungan hidup dan terdokumentasikan dengan baik.

Dampak dari pelaksanaan program ini terjaganya kualitas lingkungan hidup kota.

II.1.5. Pemerintahan Kota

5.1. Pembangunan Bidang Hukum.

Pembangunan Bidang Hukum pada tahun 2000 diselenggarakan melalui program pembangunan sistem hukum nasional yang telah menyerap dana Rp. 237.932.500,- dari rencana dana yang dianggarkan sebesar Rp. 240.000.000,- atau dapat dikatakan dalam persentase sebesar 99,14 %, dengan didukung oleh 4 (empat) buah kegiatan proyek yaitu :

- a. Proyek penerbitan dan sosialisasi produk hukum.
- b. Proyek Pelayanan hukum dan peradilan.
- c. Proyek peningkatan penegakan peraturan daerah.
- d. Proyek Pembinaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dengan hasil yang didapat dari kegiatan tersebut :

- a. Tersusunnya produk-produk hukum Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi sosialisasi kepada masyarakat, adapaun produk hukum tersebut berupa 72 Peraturan Daerah, 17 Lembaran Daerah, 850 Keputusan Walikota, 13 Instruksi Walikota, 80 Surat Edaran, 13 Lembaran Kota dan 15 Pengumuman.

Sementara itu dari hasil inventarisasi, evaluasi dan pengkajian peraturan daerah yang perlu disesuaikan dengan sosialisasi hukum diharapkan masyarakat akan dapat semakin terdorong untuk melaksanakan hukum dan peraturan-peraturan daerah lainnya.

- b. Tertanganinya berbagai masalah hukum yang menyangkut dengan tugas dan fungsi kota bandung baik pidana, perdata maupun tata usaha negara dalam rangka pelayanan hukum dan pradilan tersebut. Dengan tertanganinya masalah hukum dari,
 - Masalah PTUN telah terselesaikan 7 perkara tingkat pertama, 4 perkara tingkat banding dan 4 perkara tingkat kasasi.
 - Masalah peradilan umum telah terselesaikan 4 perkara tingkat pertama, 6 perkara tingkat banding dan 7 perkara tingkat kasasi.

Dalam hal tersebut manfaat yang diperoleh senakin terjaganya eksistensi Pemerintah Kota Bandung terhadap masalah hukum akibat kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota.

- c. Terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum
- d. Daerah dan peraturan-peraturan Daerah melalui kegiatan operasi justisi secara rutin dan terpadu dan bekerjasama dengan unsur kepolosian dan unit kerja lainnya. Upaya hukum seperti ini diharapkan akan dapat menekan terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang akan berdampak pada semakin tertibnya kondisi dan aktifitas warga Kota Bandung.
- e. Terselenggaranya upaya-upaya penegakan hukum (Low Inforcement) oleh aparatur PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), manfaat yang dapat diperoleh dari program ini secara internal adalah kualitas PPNS yang dapat semakin meningkat dan akan mendorong kinerja PPNS itu sendiri.

5.2. Pembangunan Bidang Politik.

1. Pembangunan Bidang Politik di Kota Bandung yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2000 diimplementasikan melalui program-program sebagai berikut :
 1. Program pembinaan Politik Dalam Negeri.
 2. Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 3. Program Pengembangan Operasi Penerangan.
 4. Program Peningkatan prasarana dan sarana Aparatur Pemerintah.
 5. Program Pembangunan Kota.
 6. Program Pembangunan Desa.
 7. Program Pembinaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 8. Program Pengembangan Sistem Informasi.
 9. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik.
 10. Program Pendidikan dan latihan Aparatur Pemerintah.

Pembangunan bidang politik ini diselenggarakan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 21.153.209.214 dari yang direncanakan sebesar Rp. 21.591.753.500,-

2. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui 1 (satu) proyek yaitu proyek Pembinaan Politik, Pengamanan Politik, Pembinaan Ketertiban Umum, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Tata Usaha.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek di atas adalah telah tersosialisasikannya hasil-hasil sidang umum dan sidang istimewa MPR tahun 1999/2000 kepada para aparat Desa/Kelurahan, terselenggaranya forum silaturahmi dan dialog antara Pemerintah dengan masyarakat Kota Bandung serta terselenggaranya pelayanan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang menyangkut dengan ketertiban kehidupan politik. Dengan adanya kegiatan-kegiatan diatas maka manfaat yang dapat dirasakan sampai sejauh ini dapat terpeliharanya stabilitas kehidupan sosial politik di Kota Bandung.

3. Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dilaksanakan melalui proyek-proyek Penataan Kewenangan dan Kelembagaan dalam rangka Pelaksanaan OTDA dan Proyek Pameran Potensi Daerah Otonom Expo 2000.

Hasil yang telah dicapai serta manfaat dari pelaksanaan proyek tersebut diatas diantaranya adalah tersusunnya dan terbentuknya organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :

- 20 Dinas Daerah.
 - 3 Assisten Sekretaris Daerah.
 - Lembaga teknis Daerah yang meliputi 4 buah Badan, 8 Kantor dan 4 Unit Pelaksana Daerah.
4. Program Pengembangan Operasi Penerangan dilaksanakan melalui proyek penunjang kegiatan Humas dan Proyek Bandung Peduli. Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah tersebar luasnya informasi pembangunan kepada masyarakat, sehingga diharapkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Kota Bandung akan semakin tinggi yang pada gilirannya akan mendorong semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 5. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Pemerintah dilaksanakan melalui 21 Proyek. Peningkatan Prasarana dan Sarana di berbagai Dinas/Lembaga dan Bagian-Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Manfaat yang dirasakan adalah telah terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatus Pemerintah, sehingga akan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur.
 6. Program Pembangunan Kota dilaksanakan melalui proyek-proyek Pembinaan Kecamatan; Proyek Kerjasama dengan Kabupaten Bandung; Proyek Pembinaan Kegiatan K3 dan Proyek Sarana Perkotaan serta Patok Batas antar Wilayah. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah telah terselenggaranya Koordinasi Pembangunan Daerah antara Kabupaten dengan Kota Bandung, sehingga akan dapat memadukan potensi-potensi yang ada serta dapat memecahkan berbagai permasalahan terutama dalam aspek-aspek prasarana jalan, persampahan dan kebutuhan air bersih baik di Kota Bandung maupun di Kabupaten Bandung.
 7. Program Pembangunan Desa, dilaksanakan melalui 11 Proyek yang titik beratnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek-proyek tersebut diantaranya adalah :

- i. telah terselenggaranya usaha peningkatan ekonomi masyarakat Desa melalui kegiatan Produk unggulan, sehingga dapat menghimpun dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.100.775.000,-

- ii. Telah terselenggaranya kegiatan pemugaran dan perbaikan 10 rumah keluarga Pra Sejahtera.
 - iii. Semakin berperannya lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mengelola dana bantuan usaha ekonomi dan bantuan pembangunan lainnya.
8. Program Pembinaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dilaksanakan melalui 8 Proyek. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan proyek-proyek ini adalah terbaginya produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini serta tersedianyasistem informasi kepegawaian, akta-akta Catatan Sipil dan dokumentasi hukum.
 9. Program Pengembangan Sistem Informasi, dilaksanakan melalui 6 Proyek yang titik beratnya pada pengembangan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota.
Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah :
 - i. Telah terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintahan Kelurahan/Desa.
 - ii. Tersedianya sarana teknologi informasi yang dapat mendukung terbangunnya sistem informasi yang dapat diakses secara mudah, murah dan cepat.
 10. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik dilaksanakan melalui 11 Proyek.
Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah :
 - i. Terwujudnya Sistem pelayanan yang efisien dan efektif.
 - ii. Terwujudnya sistem pembinaan keuangan Daerah yang baik.
 11. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Pemerintaha, dilaksanakan melalui 13 Proyek.
Hasil yang telah dicapai diantaranya adalah :
 - i. Tercapainya Administrasi pegawai dalam bentuk pelayanan kenaikan pangkat secara tepat waktu.
 - ii. Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi yang baik antara Legislatif dan Eksekutif.

5.3. *Keamanan dan Ketertiban.*

Program ini di arahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan meningkatkan tugas pokok dan fungsi serta profesionalisme Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkn kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab yang dilaksanakan melalui program kekuatan wilayah yang diaplikasikan ke dalam proyek : Pembinaan Kewilayahan Operasional dan Instansi Terkait, Proyek Pembinaan Keamanan dan Ketertiban dan proyek peningkatan koordinasi pengawasan, perjudian, prostitusi dan NAFZA. Hasil yang telah di capai program tersebut terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum yang di indikasikan dengan tidak terjadinya gejolak sosial yang mengarah kepada tindakan –tindakan destruktif dan tindakan-tindakan yang menyangkut masalah sara. Kondisi seperti ini di dukung pula oleh peran serta masyarakat yang semakin aktif dan peduli terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan penyakit masyarakat. Dampak yang di diharapkan program ini adalah terwujudnya suasana yang kondusif guna meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya program-program pembangunan mendatang.

II.1.6. Pembiayaan

Pembangunan bidang pembiayaan selama tahun anggaran 2000 di selenggarakan melalui program penerimaan keuangan daerah dan program pengembangan lembaga keuangan daerah. Program ini telah menyerap dana sebesar Rp. 3.065.488.400,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.075.000.000,- (99,69%). Pembangunan pada bidang pembiayaan di arahkan pada upaya peningkatan keuangan daerah. Bidang pembiayaan di kelola melalui program penerimaan keuangan daerah dan program pengembangan keuangan daerah yang di dukung oleh 5 (lima) buah proyek pembangunan.

6.1. Program Penerimaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program penerimaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) yang di aktualisasikan melalui kegiatan yang terdiri dari :

- a. Proyek peningkatan sumber pendapatan daerah
- b. Proyek penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan data objek dan subjek PBB.
- c. Proyek penelitian potensi PADS

Hasil yang telah di capai melalui penyelenggaraan program ini adalah tersedianya data potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, sedangkan manfaat dan dampak dari program ini adalah meningkatnya pendapatan asli daerah/ PAD yang juga akan dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan kota.

6.2. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Daerah

Pelaksanaan program pengembangan lembaga keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor lembaga keuangan daerah.

Program tersebut di dukung oleh 2 (dua) kegiatan proyek yang terdiri dari :

- a. Proyek penyempurnaan sarana organisasi Dinas Pendapatan Daerah
- b. Proyek penyaluran pinjaman ke Perusahaan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun hasil yang telah di capai melalui penyelenggaraan program ini adalah tersedianya sarana lembaga pengelola pendapatan daerah serta terwujudnya peningkatan, penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan manfaat yang di dapat dari program tersebut adalah meningkatnya PAD yang juga di ikuti dengan meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan kota khususnya dalam mendorong dalam terlaksananya Otonomi Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2001 (Triwulan I s/d Triwulan IV)

2.1. Pembangunan Bidang Agama

Pembangunan bidang agama pada tahun anggaran 2001 diselenggarakan melalui program peningkatan sarana kehidupan beragama, dengan anggaran sebesar Rp. 6.800.000.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 5.181.900.000.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan kegiatan keagamaan, antara lain berupa pemberian bantuan rehabilitasi dan kegiatan operasional DKM, serta kegiatan keagamaan lainnya kepada 50 yayasan/organisasi masyarakat, pembangunan lanjutan pondok Pesantren Da'rut Taubah, serta penataan Mesjid Agung Bandung.

2.2. Pembangunan Bidang Hukum

Pembangunan bidang Hukum pada tahun anggaran 2001 diselenggarakan melalui program pengembangan sistem hukum, program pelayanan dan bantuan hukum dan program pembinaan sarana dan prasarana hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 733.000.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 314.035.950,-.

Program ini bertujuan untuk penataan, pensosialisasian Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, menginventarisasi dan mengevaluasi produk-produk yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta masalah Hak Asasi Manusia dan tertib hukum.

Program ini telah menghasilkan tersusunnya dokumen produk hukum dan terselenggaranya upaya-upaya penegakkan hukum di Kota Bandung, yang berdampak pada terwujudnya suasana kondusif dalam membangun kesadaran dan komitmen warga kota Bandung.

2.3. Pembangunan Bidang Politik

Pembangunan bidang politik pada tahun anggaran 2001 diselenggarakan melalui:

1. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
2. Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Program Pengembangan Operasi Penerangan
4. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Pemerintah
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
6. Program Pembangunan Desa
7. Program Pembangunan Daerah Tk. II
8. Program Pembinaan Prasarana dan Sarana IPTEK
9. Program Pengembangan Sistem Informasi
10. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik

Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan budaya politik yang demokratis dan peningkatan pendidikan politik praktis, sehingga dapat terwujudnya kesadaran berpolitik dikalangan masyarakat, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur negara, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan serta penerapan IPTEK bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Khusus dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur negara, Pemerintah Kota Bandung diantaranya telah menata ulang secara menyeluruh struktur organisasi yang ada, melalui Perda No. 03/2001 sampai dengan Perda No. 08/2001 yang ditindak lanjuti dengan rincian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan walikota Bandung No. 325 sampai dengan 329 Tahun 2001, serta ditindak lanjuti juga oleh penyusunan uraian tugas pemegang jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bandung

No. 330 sampai dengan 335 Tahun 2001, sehingga pada saat sekarang ini Pemerintah Kota Bandung memiliki 14 lembaga teknis, 20 Dinas, 26 Kecamatan, 139 Kelurahan,/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.

Pembangunan bidang politik ini diselenggarakan dengan anggaran sebesar Rp.56.406.523.400,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.27.716.155.468,-.

2.4. Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pembangunan bidang sosial budaya diselenggarakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Program Pembinaan tenaga kependidikan dan budaya
3. Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Program Perbaikan Gizi
5. Program Kependudukan
6. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
7. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial
8. Program Penanggulangan Bencana Alam
9. Program Penyuluhan Kesehatan
10. Program Pelayanan Kesehatan dan Rujukan dari Rumah Sakit
11. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
12. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
13. Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
14. Program Peranan Wanita
15. Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja
16. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya melalui Revitalisasi 24 SD/MI penggabungan SD dari 113 SD menjadi 53 SD serta penerapan uji coba Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di 34 SD di 26 Kecamatan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan karang taruna, pemetaan administrasi kependudukan dan pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana, antara lain dengan diselenggarakannya bantuan alat kontrasepsi kepada 6.360 orang, pembinaan sosial kemasyarakatan dan penanganan sosial terpadu, antara lain berupa pembinaan terhadap 120 anak-anak terlantar, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan pelayanan kesehatan terpadu di 12 lokasi kumuh, pengadaan obat-obatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan rehabilitasi 19 Puskesmas dan rumah dinas Dokter, serta terciptanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi para penganggur dan korban PHK sebanyak 100 orang.

Pembangunan di bidang Sosial Budaya ini diselenggarakan dengan anggaran sebesar Rp.31.376.792.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.14.475.265.752.

2.6. Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban pada tahun anggaran 2001 diselenggarakan melalui program pembinaan kekuatan rakyat dan program kewilayahan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan penyuluhan dalam bidang perlindungan masyarakat dan penertiban serta penanganan perjudian, protitusi dan NAFZA, serta peningkatan pembinaan kewilayahan operasional dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Bandung.

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban ini di selenggarakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.208.200.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.575.663.525,-

2.7. Pembangunan Bidang Pengawasan

Pembangunan bidang pengawasan pada tahun anggaran 2001 di selenggarakan melalui pendayagunaan sistim dan pelaksanaan pengawasan.

Program ini bertujuan antara lain untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan pemeriksaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.172.583.600,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 6.055.913.235,-

2.8. Pembangunan Bidang Ekonomi Kota

Untuk mencapai 6 (enam) sasaran dari 8 (delapan) sasaran pembangunan bidang ekonomi di Kota Bandung pada tahun 2001 telah di selenggarakan melalui 13 (tiga belas) program. Adapun sasaran dan program tersebut adalah :

- (1) Untuk mencapai sasaran tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang didukung dengan pengawasan dan perlindungan konsumen, telah dilaksanakan program-program yaitu : pembangunan pertanian rakyat terpadu, program pembangunan peternakan, dan program pembangunan sarana dan prasarana perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilaksanakan melalui 6 (enam) proyek dengan total anggaran biaya sebesar Rp. 755.000.000,- dengan tingkat realisasi keuangan sampai triwulan III adalah sebesar Rp. 393.894.450,- dan realisasi fisik sebesar 75 %.
- (2) Untuk mencapai sasaran penciptaan iklim investasi yang kondusif telah dilaksanakan program-program : pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.
Untuk mencapai sasaran tersebut telah dialokasikan kedalam 3 (tiga) proyek yang bernilai total Rp. 695.000.000,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan III sebesar Rp.120.643.000,- dan realisasi fisik sebesar 45%.
- (3) Untuk mencapai sasaran terfasilitasinya modal dan manajemen kelembagaan dalam rangka kemitraan usaha telah dilaksanakan program-program : Pengembangan lembaga keuangan dan pembinaan keuangan negara.
Untuk mencapai sasaran tersebut telah dialokasikan kedalam 5 (lima) proyek dengan alokasi biaya sebesar Rp. 2.727.000.000,- dengan tingkat realisasi sampai triwulan III adalah sebesar Rp. 1.924.184.780,- dan realisasi fisik mencapai 61 %.

- (4) Untuk mencapai sasaran terwujudnya usaha kecil menengah dan koperasi yang efisien telah dilaksanakan program-program : pengembangan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, program pembangunan pertanian rakyat terpadu, program pengembangan usaha peternakan, pembangunan sumber sarana dan prasarana perikanan, dan program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, pengembangan lembaga keuangan dan pembinaan kekayaan negara.
Untuk mencapai sasaran tersebut telah dialokasikan kedalam 22 (dua puluh dua) proyek dengan biaya sebesar Rp. 4.921.700.000,-. Tingkat realisasi sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 2.745.283.820,- dan realisasi fisik mencapai 59%.
- (5) Untuk mencapai sasaran terwujudnya Bandung sebagai daerah tujuan wisata dan berkembangnya system pariwisata daerah secara terpadu telah dilaksanakan program pemasaran pariwisata dengan alokasi biaya sebesar Rp. 1.890.000.000,- dengan tingkat realisasi sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 924.661.200,- dan realisasi fisik/kegiatan mencapai 49%.

Prediksi Triwulan IV tahun 2001

Secara keseluruhan, dari proyek yang dilaksanakan pada tahun 2001 dengan nilai total anggaran sebesar Rp. 10.988.700.000,- sampai dengan triwulan III dana yang terserap adalah sebesar Rp. 6.108.667.250,- atau mencapai 56 %. Beberapa kendala yang dihadapi dalam realisasi dan penyerapan dana sisanya (44 %) antara lain :

1. Adanya perubahan anggaran,
2. Terjadinya mutasi pegawai pada masing-masing dinas/instansi/ lembaga yang mengelola proyek yang berdampak pada permasalahan administrasi proyek.

Adapun 2 (dua) sasaran lainnya dalam pembangunan bidang ekonomi kota yaitu terciptanya konversi dan revitalisasi kelembagaan BUMD dan terkelolanya asset pemerintah daerah secara optimal belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2001, diharapkan sasaran tersebut dapat dicapai melalui program dan proyek pada tahun berikutnya.

2.9. Pembangunan Bidang Penataan Kota

Evaluasi pelaksanaan program/proyek bidang perencanaan fisik dan prasarana tahun anggaran 2001

Bidang perencanaan fisik dan prasarana meliputi sektor Sumberdaya Air dan Irigasi, Transportasi, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta Perumahan dan permukiman. Jumlah proyek sebanyak 56 atau 19,65 % dari seluruh proyek Tahun Anggaran 2001 (285 proyek), dengan alokasi dana sebesar Rp.79.950.498.000,- atau 39,89 % dari total dana yang dialokasikan untuk seluruh proyek (Rp.200.432.998.000,-). Gambaran keseluruhan proyek bidang fisik dan prasarana dapat dilihat pada table.

Rekapitulasi Proyek Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana T.A. 2001

NO.	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	DANA		%
			RENCANA	REALISASI	
1	Sumber Daya Air dan Irigasi	4	4.270.000.000	2.615.265.927	2,13
2	Transportasi	16	11.920.000.000	5.339.503.092	5,95
3	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	27	59.249.498.000	24.601.859.206	29,56
4	Perumahan dan Permukiman	9	4.511.000.000	2.438.713.360	2,25
Jumlah Total :		56	79.950.498.000	34.995.341.585	39,89

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar dana pembangunan diperuntukkan bagi program pembangunan jangka pendek dan mendesak, seperti relokasi penduduk yang berdomisili di lokasi proyek jalan layang PASPATI, pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan Gedebage dan penyediaan lahan untuk fasos dan fasum.

Realisasi dana hingga triwulan ke-tiga ini baru mencapai 43,77 %, sedangkan kemajuan fisiknya adalah sebagai berikut:

- 22 proyek mencapai kemajuan fisik < 50 %
- 34 proyek mencapai kemajuan fisik > 50 %
- 17 proyek mencapai kemajuan fisik > 70 %

Seharusnya kemajuan fisik hingga saat ini telah mencapai > 70 %, namun kenyataannya baru 17 proyek (30,36 %). 34 proyek (60,71 %) telah mencapai kemajuan fisik di atas 50 %. Ada 22 proyek yang mengalami hambatan kemajuan fisik.

Rincian dari hasil pelaksanaan proyek sampai dengan Triwulan III 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sumber daya Air dan Irigasi
Untuk program pengembangan dan konservasi sumber daya air telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan sumber mata air di 4 lokasi, perbaikan saluran untuk penanggulangan bencana di 18 saluran, dan perbaikan 15 saluran penggelontoran. Sedangkan untuk program pengelolaan jaringan irigasi telah dilaksanakan perbaikan 3 buah saluran irigasi.
- Transportasi
Untuk program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan telah dilaksanakan kegiatan kegiatan: pemeliharaan ATCS dan lampu lalu lintas, penataan 4 unit sub terminal, pemeliharaan fasilitas di terminal antar kota dan pembuatan rencana gedung PKB beserta penyusunan REPERDA-nya. Sedangkan untuk program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan telah pula dilaksanakan kegiatan-kegiatan:
 - Peningkatan jalan dan pembangunan jembatan
 - Normalisasi saluran, gorong-gorong dan trotoar
 - Pembelian 1 paket alat test laboratorium dan pelaksanaan pengujian bahan.
 - Pengadaan bahan untuk rutin dan penanggulangan bencana

- Pembuatan 1 paket data base untuk leger jalan.
 - Pemeliharaan jalan Hotmix seluas 9.520 m²
 - Pemeliharaan jalan, jembatan, saluran, berm dan trotoar di 6 Cadin wilayah
- Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- Untuk program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan:
- Penataan dan pembuatan jalan setapak lahan pemakaman di 13 TPU
 - Penyusunan studi identifikasi potensi pengembangan jasa di Kota Bandung
 - Penataan kali Cikapundung di 3 titik lokasi
 - Penyusunan laporan pemetaan lingkungan dan NKLD (draft laporan).
 - Peningkatan kualitas 7 buah taman kota dan pembangunan dan penyempurnaan 17 buah taman kota.
 - Pemasangan baru 29 buah penerangan jalan umum dan 8 buah lampu taman.
 - Penyusunan 3 buah kajian tentang penataan jalur hijau.

Sedangkan untuk program pengendalian pencemaran lingkungan hidup telah pula dilaksanakan kegiatan-kegiatan:

- Pengendalian penanggulangan pencemaran kali bersih (PROKASIH) di 3 ruas sungai dan 15 lokasi industri.
- Pengendalian kualitas udara di 10 lokasi dan uji emisi 150 kendaraan.
- Pembuatan 1 paket informasi lingkungan terhadap masyarakat.

Selanjutnya untuk program penataan ruang telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan:

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sampai tahapan Buku Analisa dan Draft Rencana, serta Studi Penataan Wilayah Ujungberung (Draft Laporan akhir).
- Penyusunan RTBL di lokasi Punclut dan Penataan sarana lapangan Tegalega berupa perbaikan gedung dan sarana kolam renang.
- Pembelian dan pembebasan lahan untuk proyek RSUD Ujung berung, Pasar Hewan, Terminal Wilayah Gedebage, jalan layang PASUPATI dan lahan PT. KAI (Teluk Buyung).

Disamping itu untuk program penataan pertanahan telah dilakukan pendataan penguasaan lahan di tepi sungai dan 1 paket brosur untuk pembinaan keagrarian.

- Perumahan dan Permukiman
- Untuk program penyediaan perumahan dan permukiman telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan: perbaikan peta dasar, pengadaan 2 buah arm roll truck dan pemutakhiran data digital kota Bandung skala 1:1000. Juga dilaksanakan penataan di TPA Leuwigajah dan pengoperasian insenerator.
- Sedangkan untuk program penataan bangunan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan: pembuatan rencana persyaratan teknis bangunan gedung dan penyiapan data base bangunan.

Dari pelaksanaan pembangunan TA.2001 dapat diidentifikasi sektor-sektor prioritas beserta alokasi anggarannya sebagai berikut:

Sektor Prioritas Program Pembangunan Tahun Anggaran 2001

NO.	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	ALOKASI DANA (Dalam Ribuan Rp.)	%
1	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	27	59.249.498	29,6
2	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	56	47.801.687	23,8
3	Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	16	14.881.000	7,4
4	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita,	32	14.702.920	7,3
5	Anak dan Remaja			
6	Transportasi	16	11.920.000	5,9
	Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi	21	11.792.201	5,9
	Jumlah Total :	168	160.347.306	80,0

Sumber : Hasil analisa, Bappeda Kota Bandung, 2001

Dua sektor di antara 6 sektor prioritas merupakan sektor bidang fisik dan prasarana, yaitu sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta sektor Transportasi, dimana sektor-sektor ini merupakan 35,6 % dari total rencana biaya. Penentuan sektor prioritas ini didasarkan pada upaya untuk menunjang pencapaian visi kota Bandung, yakni meningkatkan peran kota Bandung sebagai kota jasa.

Proyek pembangunan yang termasuk sektor prioritas berjumlah 171 proyek dengan total alokasi dana sebesar Rp. 160.347.306.000,- atau 80% dari total anggaran belanja pembangunan.

Sektor prioritas ini, khususnya bidang fisik dan prasarana ditujukan untuk meningkatkan perekonomian kota, antara lain melalui: Penataan kota untuk memperlancar arus koleksi dan distribusi produk ekonomi, meningkatkan kemampuan pelayanan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Permasalahan di bidang fisik dan prasarana antara lain adalah:

1. Belum optimalnya pengaturan dan pemanfaatan ruang kota, sehingga timbul dampak ikutan berupa kemacetan lalu lintas, penurunan Ruang Terbuka Hijau, kawasan kumuh dan Pedagang Kaki Lima (PKL);
2. Belum cukupnya kapasitas system pelayanan kota, berdampak pada munculnya berbagai permasalahan seperti: penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, transportasi dan infrastruktur kota lainnya;
3. Terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan sehubungan dengan diberlakukannya struktur organisasi yang baru dan terjadinya penggabungan beberapa unit kerja/dinas di lingkungan Pemerintah kota;
4. Menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan;
5. Keterbatasan pembiayaan, dimana ketergantungan kota terhadap dana perimbangan (DAU) relatif sangat tinggi, yakni Rp. 393.550.000.000,- sebagai konsekuensi dari proses desentralisasi untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan kota.

PROGRAM UNGGULAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA TAHUN 2002

Dalam penyusunan rencana program/proyek pembangunan Tahun Anggaran 2002 melalui mekanisme Rakorbang, Pemerintah Kota juga menginventarisasi perencanaan-perencanaan yang bersifat unggulan (*crash program*), termasuk bidang fisik dan prasarana. Hal ini didasari pemikiran bahwa potensi dan aksesibilitas yang dimiliki oleh kota Bandung sangat tinggi sehingga perlu disusun konsep perencanaannya untuk mengakomodasikan minat sektor swasta dan lembaga keuangan lainnya untuk ikut berpartisipasi.

Beberapa diantara usulan program ini sudah terakomodasi dalam usulan melalui Rakorbang Tahun Anggaran 2002, terutama yang diusulkan untuk dimintakan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Rincian usulan proyek unggulan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Program / Proyek Unggulan Bidang Fisik dan Prasarana T.A. 20002

NO.	PROGRAM / PROYEK UNGGULAN	SUMBER DANA	KETERANGAN
1.	Pembangunan Akses Toll Gedebage	Pusat/Swasta	Perencanaan Sudah Ada
2.	Pembangunan Terminal terpadu Gedebage	Pusat/Swasta	Perencanaan Sudah Ada
3.	Pembangunan Fly Over Kiaracondong	Pusat	Perencanaan Sudah Ada
4.	Pengembangan Sistem Angkutan Massal (LRT)	Pusat/Swasta	Perencanaan Sudah Ada
5.	Pembangunan Stadion Olah Raga Gedebage	Swasta	Perencanaan Sudah Ada
6.	Pembangunan Pasar Hewan Gedebage	Swasta	Perencanaan Sudah Ada
7.	Penataan Kawasan Bandung Timur	Swasta	Perencanaan Sdg Disusun
8.	Pengembangan Kawasan Puncut	Swasta	Perencanaan Sdg Disusun
9.	Penataan Kawasan Pusat Kota	Swasta	Perencanaan Sdg Disusun
10.	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan bermotor (PKB)	Pusat/Swasta	Perencanaan Sdg Disusun
11.	Pembangunan Bendungan Sungai Cikapundung	Pusat	Perencanaan Sdg Disusun
12.	Penataan/Revitalisasi Pasar-Pasar se- Kota Bandung	Swasta	Perencanaan Sdg Disusun

BAB III

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2002

3.1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Terdapat dua arus utama (*dual trend*) yang memberi dampak demikian besar terhadap perkembangan bangsa saat ini. Pada satu sisi terjadi arus globalisasi yang melanda semua negara, dan pada sisi lain menguatnya semangat regionalisasi dan desentralisasi. Kedua arus ini telah menimbulkan dampak yang cukup besar pada perkembangan bangsa, baik secara positif maupun negatif serta sekaligus memberikan peluang serta tantangan yang tidak ringan untuk diatasi. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bandung dewasa ini adalah semakin deras arus informasi dan transformasi budaya sebagai dampak dari globalisasi. Dalam hubungannya dengan kondisi tersebut terutama dengan mencermati fenomena yang berkembang saat ini, persoalan pokoknya adalah siapakah SDM kita untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi berbagai tantangan itu.

Pembangunan sumberdaya manusia menurut konsep UNDP (*United Nation Development Program*) bertujuan untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) yang dapat dilihat sebagai upaya kearah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang ingin dicapai dari upaya tersebut. Perluasan pilihan tersebut antara lain untuk hidup lebih sehat dan lebih lama, bertambah terdidik dan mandiri, serta memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya dan fasilitas sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, sejak tahun 1990 UNDP menggunakan HDI (Human Development Index = Indeks Pembangunan Manusia/IPM) sebagai indikator peringkat sumberdaya manusia. HDI adalah indeks gabungan (*composite index*) yang ditentukan berdasarkan rata-rata umur harapan hidup (*life expectancy*) yang menggambarkan derajat kesehatan dan gizi, kemampuan baca tulis, dan tingkat partisipasi pendidikan, serta pendapatan perkapita (*purchasing power parity*). Peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada kurun waktu tertentu dicerminkan oleh meningkatnya HDI/IPM.

Kota Bandung dalam perkembangannya yang demikian pesat telah menarik sangat banyak penduduk pendatang baik yang akhirnya menetap maupun penduduk komuter. Keadaan ini telah menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang berpenduduk multi-etnis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan warga keturunan. Penduduk baik yang menetap maupun penduduk komuter pada dasarnya hidup dan berinteraksi mulai dalam masing-masing kelompoknya, dan pada akhirnya bersosialisasi dengan lingkungan dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun demikian, pada dasarnya setiap penduduk akan lebih banyak berinteraksi dengan penduduk lain baik menurut kelompok etnis, kelompok budaya, kelompok kepentingan, kelompok profesi, dan sebagainya.

Menghadapi kondisi demikian, maka pembangunan sumberdaya manusia harus dilakukan melalui pendekatan kultural yang dimulai dari kelompok-kelompok yang ada. Hal demikian dimaksudkan untuk mendorong pembentukan norma dan nilai tradisi yang bersifat “guyub”, dimana pada gilirannya dapat mendorong perwujudan masyarakat madani, yang merupakan landasan bagi tercapainya sasaran untuk mewujudkan kerangka dasar yang mantap bagi kehidupan warga kota Bandung.

Untuk mendorong tercapainya sasaran tersebut, dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004 telah digariskan berbagai program yang terkait dengan pembangunan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk diimplementasikan dalam pembangunan daerah pada setiap tahunnya.

Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 ini, program-program yang perlu dilaksanakan dan indikasi kegiatan yang harus terkandung dalam masing-masing program pada bidang pembangunan kualitas Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Mental dan Rohani.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan ketahanan mental dan spiritual aparatur birokrasi dan masyarakat;
2. Pembudayaan lingkungan kerja berwawasan religius;
3. Pelaksanaan gerakan peningkatan ilmu, iman, dan takwa.

b. Program Pendidikan Agama Tingkat Dasar.

Indikasi Kegiatan :

1. Inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan keagamaan tingkat dasar;
2. Pengembangan kurikulum pendidikan keagamaan tingkat dasar;
3. Pengembangan kegiatan TPA dan TKA;
4. Pengembangan metode Iqra;
5. Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan;
6. Peningkatan peran serta orang tua dalam pendidikan agama;
7. Peningkatan kualitas pengajaran.

c. Program Pendidikan Agama Tingkat Menengah.

Indikasi Kegiatan :

1. Inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan agama tingkat menengah;
2. Pengkajian kualitas hasil pendidikan keagamaan;
3. Apresiasi produk-produk pendidikan keagamaan;
4. *Capacity Building* lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan;
7. Peningkatan kemampuan dan apresiasi tenaga pendidik keagamaan.

d. Program Bimbingan dan Penerangan Kerukunan Hidup Beragama.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan suasana kerukunan antar umat beragama;
2. Penyediaan prasarana dan sarana kegiatan kerukunan hidup beragama.

e. Program Peningkatan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kerjasama antar umat beragama dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan;
2. Peningkatan kegiatan silaturahmi antar umat beragama.

f. Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama.

Indikasi Kegiatan :

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peribadatan.

g. Program Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan manajemen pelayanan ibadah haji;
2. Penyediaan kebutuhan prasarana dan sarana ibadah haji;
3. Peningkatan pelayanan pasca Ibadah Haji.

h. Program Peningkatan Pelayanan Zakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan penerimaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh;
2. Pengembangan sistem pelayanan Zakat, Infak, dan Shodaqoh secara transparan;
3. Pengembangan model distribusi hasil pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.

I. Program Pendidikan Dasar.

Indikasi Kegiatan :

1. Revitalisasi dan penggabungan SD/MI;
2. Peningkatan kegiatan Wajib Belajar 9 tahun;
3. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar;
4. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dasar;
5. Peningkatan otonomi manajemen pendidikan dasar;
6. Pemerataan prasarana dan sarana pendidikan dasar;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar;
8. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar;
9. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga pengajar dan pengelola pendidikan dasar;
10. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar berbasis muatan lokal dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil didik.

j. Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan;
2. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan menengah dan kejuruan;
3. Pengembangan kurikulum pendidikan menengah dan kejuruan yang berorientasi pada produktivitas;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan sektor swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan lulusan dan hasil didik;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan;
6. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;
7. Peningkatan otonomi manajemen pendidikan menengah dan kejuruan;
8. Penerapan teknologi tepat guna (TTG);
9. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga pengajar dan pengelola pendidikan menengah dan kejuruan.

k. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Indikasi Kegiatan :

1. Rekrutmen penduduk usia sekolah yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah untuk dididik dan dilatih keterampilan;
2. Percepatan penuntasan buta aksara;
3. Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan lembaga PLS;
5. Penyediaan prasarana dan sarana kebutuhan PLS;

6. Pengembangan dukungan masyarakat dan kemitraan dengan swasta dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan lulusan PLS

l. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan dan apresiasi KBM;
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
3. Peningkatan pelayanan kepegawaian;
4. Peningkatan efisiensi tenaga pendidik;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pengajaran.

m. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Perpustakaan Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan;
2. Peningkatan kegiatan dan manajemen perpustakaan Desa, sekolah dan keliling;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah dan perpustakaan keliling;
4. Peningkatan mutu dan jumlah buku-buku perpustakaan;
5. Peningkatan kegiatan dan pembudayaan membaca.

n. Program Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme pengelola perpustakaan;
2. Peningkatan kesejahteraan tenaga perpustakaan.

o. Program Pengembangan Sistem dan Kurikulum Pendidikan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan dan pemanfaatan muatan lokal dalam Kurikulum pendidikan;
2. Peningkatan dan pengembangan kegiatan ekstra kurikuler yang berbasis religius dan teknologi;
3. Penyediaan buku-buku wajib dan buku penunjang pendidikan.

p. Program Pengembangan Pusat-pusat pendidikan dan Keterampilan.

Indikasi Kegiatan :

1. *Capacity building* lembaga-lembaga pendidikan Negeri dan Swasta;
2. Review terhadap lokasi pusat pendidikan dan keterampilan sesuai dengan RUTRK.

q. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penataan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Review terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

r. Program Kemitraan Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kerjasama kemitraan antara lembaga pendidikan dengan perusahaan swasta;
2. Pendayagunaan Balai Latihan Kerja (BLK).

3.2. E k o n o m i

Sejak terjadinya krisis ekonomi, permasalahan ekonomi Kota Bandung masih belum dapat beranjak dari permasalahan-permasalahan yang muncul sejak beberapa tahun lalu, dan masih diwarnai oleh dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan dan permasalahan yang menyertai perkembangan kondisi Kota Bandung itu sendiri. Sementara itu dalam Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004, sasaran pembangunan Kota Bandung bidang ekonomi saat ini meliputi : (a) tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang didukung dengan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen; (b) terciptanya iklim investasi yang kondusif; (c) terfasilitasinya modal dan manajemen kelembagaan dalam rangka kemitraan usaha; (d) terwujudnya usaha kecil, menengah, dan koperasi yang efisien; (e) terciptanya konversi dan revitalisasi kelembagaan BUMD; dan (f) terkelolanya aset pemerintah kota secara optimal sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Sementara itu permasalahan yang harus ditangani dalam Tahun 2002 ini antara lain : (1) pengangguran yang meningkat; (2) iklim investasi yang belum kondusif; (3) belum tersedianya sistem informasi kota yang terpadu sebagai elemen pendukung kota jasa; (4) aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum berdampak positif terhadap roda perekonomian kota; (5) masih rendahnya kinerja usaha kecil, menengah dan koperasi; (6) masih rendahnya kinerja BUMD; (7) belum terkelolanya asset-asset milik Pemerintah Kota Bandung secara optimal; dan (8) belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk berkembangnya pembangunan pusat-pusat sekunder.

Menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi kota sebagaimana ditetapkan melalui Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004. Garis-garis besar kebijakan tersebut yaitu :

1. Pada sisi pemerintah perlu dilakukan peningkatan peran pemerintah dalam menciptakan suasana dan peluang usaha seluas-luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan; pendataan ulang, verifikasi, dan pengembangan asset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat; dan pengembangan pembangunan ke wilayah timur Kota Bandung.
2. Pada sisi kalangan pelaku ekonomi diperlukan adanya peningkatan peran PKL (Pedagang Kaki Lima) dalam sistem perekonomian kota; pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing tinggi; penataan BUMD agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang lebih profesional, efisien, dan transparan yang dapat ditempuh baik melalui kegiatan privatisasi maupun melalui kemitraan dengan swasta dan koperasi untuk memperkuat struktur ekonomi kota.

Untuk menyelenggarakan kebijakan-kebijakan tersebut, maka pada periode pembangunan Tahun 2002 ini perlu dilaksanakan program-program yang mengandung indikator-indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi.

Indikasi Kegiatan :

1. Identifikasi kapasitas/daya tampung kota untuk usaha bidang jasa;
2. Identifikasi kompetensi usaha jasa dan kebutuhan tenaga kerja;
3. Penanganan tenaga kerja *unskill* (tidak terampil);

4. Penataan kelembagaan pelatihan tenaga kerja;
5. Penciptaan tenaga kerja yang handal dan berkualitas;
6. Pencegahan praktek diskriminatif terhadap tenaga kerja;
7. Optimalisasi peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK);
8. Peningkatan profesionalisme usaha perdagangan dan jasa;
9. Pengembangan sistem informasi pasar dan jaringan distribusi usaha perdagangan dan jasa;
10. Penyusunan PERDA standarisasi dan kualitas produk-produk usaha;
11. Perencanaan pengembangan terminal terpadu produk agribisnis;
12. Pengembangan jasa layanan pendukung peningkatan mutu produk agribisnis;
13. Pembinaan upaya perlindungan terhadap konsumen;
14. Penyuluhan dan sosialisasi perlindungan hak cipta dan patent;
15. Penyelenggaraan identifikasi potensi ekonomi kota;
16. Studi strategi pengembangan jasa unggulan Kota Bandung;
17. Identifikasi Indikator Ekonomi Kota Bandung.

b. Program Peningkatan Peluang Usaha.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyederhanaan prosedur pengaturan perijinan yang membatasi ruang gerak investasi;
2. Penyediaan fasilitas peluang pengembangan usaha;
3. Penyediaan media informasi layanan (media center) pengembangan usaha.

c. Program Pengembangan Usaha Golongan Ekonomi Lemah, Koperasi, dan Pembinaan Usaha Kecil.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembinaan manajemen usaha kecil, menengah dan koperasi di berbagai bidang usaha;
2. Pengembangan keterkaitan industri hulu dan hilir;
3. Pengembangan peran perbankan untuk mengalokasikan kredit ringan khususnya bagi sektor usaha kecil dan menengah;
4. Pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk mampu bersinergi dengan usaha besar;
5. Peningkatan iklim usaha yang kondusif pada seluruh bidang usaha;
6. Pengembangan jalinan kemitraan antara UKM & koperasi dengan usaha besar dan BUMN;
7. Pengembangan produk unggulan UKM dibidang industri kecil, Rumah Tangga dan kerajinan;
8. Penyediaan fasilitas peluang pengembangan usaha
9. Studi potensi peranan PKL dan Factory Outlet terhadap peningkatan PAD Kota Bandung.

d. Program Pengembangan Usaha BUMD.

Indikasi Kegiatan :

1. Penciptaan SDM pengelola BUMD yang profesional;
2. Pengkajian produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD dari berbagai aspek (kelembagaan, pembiayaan, teknis operasional dan peran serta masyarakat);
3. Penyelenggaraan pengawasan terhadap kinerja usaha BUMD;
4. Peningkatan hubungan kerjasama antara BUMN dan BUMD lain;

5. Pengembangan pengkajian terhadap kemungkinan pembentukan lembaga BUMN baru.

e. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Pemerintah Kota.

Indikasi Kegiatan :

1. Reinventarisasi asset-asset pemerintah kota;
2. Review dan penyempurnaan peraturan pengelolaan asset pemerintah kota agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih transparan;
3. Penyiapan peraturan daerah / perangkat hukum untuk kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan asset-asset pemerintah kota;
4. Program pengembangan, pelestarian seni budaya daerah dan pemasaran pariwisata.

3.3. Sosial Budaya

Aspek-aspek yang tercakup dalam pembangunan Bidang Sosial Budaya merupakan entitas terpenting dan mendasar dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Selain mengandung komponen tujuan yang hendak dicapai, entitas sosial budaya-pun kerap menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan perilaku dengan norma, serta mengandung unsur yang dapat mempengaruhi entitas lainnya.

Menyadari akan kandungan yang multidimensional pada pembangunan bidang sosial budaya, maka program-program yang dilaksanakan harus sangat mendasar dan memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan program pembangunan di bidang lainnya. Program-program yang mendasar pada bidang sosial budaya meliputi : (1) Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan; (2) Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata; (3) Peranan Perempuan; dan (4) Pemuda dan Olah raga. Oleh karena itu program-program pembangunan Tahun 2002 yang perlu dilaksanakan serta indikasi kegiatan yang harus tercakup adalah sebagai berikut :

3.3.1. Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.

Sasaran pembangunan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan dalam Program Pembangunan Kota Bandung saat ini adalah :

- (1) Terwujudnya intensifikasi pelayanan kesehatan;
- (2) Terwujudnya diversifikasi kelembagaan kesehatan serta terpenuhinya kebutuhan obat-obatan untuk masyarakat;
- (3) Terbentuknya unit pelayanan kesehatan lingkungan terkecil di tingkat RW;
- (4) Berkurangnya kasus-kasus penyalahgunaan NAPZA;
- (5) Terlaksananya optimalisasi lembaga Tripartit;
- (6) Teridentifikasinya warga kota Bandung.

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, maka program-program yang perlu dilaksanakan selama tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Program Optimalisasi Pelayanan Kesehatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
2. Pelaksanaan rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan;
3. Pelaksanaan pengadaan obat dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Pembinaan Sarana Kesehatan.

b. Program Sosialisasi Hidup Sehat di kalangan Masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan Perilaku Hidup Sehat;
2. Pengembangan dana sehat melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
3. Pengembangan sistim informasi kesehatan;
4. Pengembangan Puskesmas Perkotaan;
5. Pengembangan perilaku hidup sehat;
6. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan;
7. Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan kesehatan.

c. Program Peningkatan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Puskesmas Keliling.

Indikasi Kegiatan :

Diversifikasi dan intensifikasi jenis pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling.

d. Program Pemenuhan Obat dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengkajian kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan obat-obatan.

e. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian keluar masuk obat-obatan dan makanan;
2. Peningkatan manajemen pengawasan dan pengendalian peredaran obat dan makanan;
3. Pencegahan penyakit menular pada hewan.

f. Program Peningkatan Sarana Kesehatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

g. Program Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Paramedik.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas, kemampuan dan keterampilan tenaga pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kinerja tenaga pelayanan kesehatan.

h. Program Pembinaan Kegiatan Pos Yandu.

Indikasi Kegiatan :

1. Pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Menyusui, dan Balita;
2. Peningkatan kinerja Pos Yandu;
3. Peningkatan kemampuan dan keterampilan kader-kader Pos Yandu;
4. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
5. Peningkatan kinerja Pos Yandu;
6. Pengembangan kegiatan di Pos Yandu.

i. Program Pemberantasan Penyalahgunaan NAPZA.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan dan Penyalahgunaan NAPZA;
2. Pelaksanaan Gerakan masyarakat anti NAPZA;
3. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi;
4. Penyuluhan tentang penyalahgunaan NAPZA;
5. Penanganan korban-korban penyalahgunaan NAPZA;
6. Pembinaan lanjutan dan pengawasan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA;
7. Penyusunan model penanganan korban penyalahgunaan NAPZA;
8. Pengolahan data penggunaan NAPZA dari apotik/ PBF dan sarana kesehatan.

j. Program Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA,

Indikasi Kegiatan :

1. Penanganan korban-korban penyalahgunaan NAPZA;
2. Pembinaan lanjutan dan pengawasan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA;
3. Penyusunan model penanganan korban penyalahgunaan NAPZA;
4. Pelaksanaan gerakan masyarakat anti NAPZA.

k. Program Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan..

Indikasi Kegiatan :

1. Sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka perlindungan hak-hak tenaga kerja;
2. Penanganan bersama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan;
3. Pengembangan potensi organisasi pengusaha dengan pekerja;
4. Penyaluran dan penempatan tenaga kerja;
5. Informasi pasar kerja;
6. Pembinaan lembaga latihan swasta.

l. Program Harmonisasi dan Demokratisasi Hubungan Industrial.

Indikasi Kegiatan :

1. Penanganan bersama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan;
2. Pengembangan potensi organisasi pengusaha dengan pekerja;
3. Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan;
4. Pengurusan persyaratan kerja;
5. Pengembangan kelembagaan dan kerjasama ketenagakerjaan.

m. Program Peningkatan Produktivitas Kerja.

Indikasi Kegiatan :

1. Rekayasa teknologi tepat guna dalam peningkatan produktivitas kerja;
2. Peningkatan keterampilan dan kemampuan kerja.

n. Program Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

Indikasi Kegiatan :

1. Pencegahan praktek diskriminatif terhadap pekerja;
2. Peningkatan kersajama antara serikat pekerja dengan pengusaha;
3. Pengawasan norma kerja;
4. Pengawasan norma keselamatan kerja;
5. Pengawasan norma kesehatan dan hygiene perusahaan;
6. Pengawasan norma jaminan keselamatan kerja;
7. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja.

o. Program Penertiban Administrasi Kependudukan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembentukan sistem dan jaringan informasi kependudukan;
2. Peningkatan penerimaan keuangan daerah dari sektor kependudukan;
3. Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk;
4. Pengendalian penduduk komuter;
5. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

3.3.2. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

Dengan memperhatikan masalah, keadaan, dan arah kebijakan pembangunan di Kota Bandung saat ini, sasaran pembangunan bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata yang harus dicapai selama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya konservasi dan apresiasi seni budaya daerah;
- (2) Terwujudnya Bandung sebagai daerah tujuan wisata;
- (3) Terlindunginya bangunan-bangunan yang memiliki citra arsitektur bersejarah baik secara fisik maupun secara administrasi;
- (4) Berkembangnya sistem pariwisata daerah secara terpadu.

Mencermati sasaran pembangunan yang hendak dicapai tersebut, maka program-program pembangunan yang harus dilaksanakan selama tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut:

a. Program Pemasaran Pariwisata.

Indikasi Kegiatan :

Peningkatan promosi wisata lokal kota Bandung di tingkat nasional dan internasional.

b. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Inventarisasi seni dan budaya daerah;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah;
3. Peningkatan apresiasi seni budaya daerah.

c. Program Kebahasaan dan Kesusasteraan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan budaya santun bahasa;
2. Pengembangan pusat-pusat seni budaya daerah (Padepokan);
3. Pengembangan kelompok pemerhati pariwisata di tingkat Kecamatan;
4. Peningkatan apresiasi sastra dan bahasa daerah;
5. Peningkatan pendidikan bahasa dan sastra di sekolah-sekolah.

d. Program Pengembangan Produk Wisata.

Indikasi Kegiatan :

Pengembangan kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan.

e. Program Perlindungan Bangunan Bersejarah.

Indikasi Kegiatan :

1. Inventarisasi bangunan-bangunan bersejarah;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah.

f. Program Pengembangan Paket-paket Tujuan Wisata.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan tenaga pemasaran paket wisata terpadu;
2. Peningkatan peran dan fungsi biro perjalanan wisata.

3.3.3. Peranan Perempuan

Keberadaan potensi perempuan hingga saat ini masih perlu terus ditonjolkan, sehingga sasaran pembangunan peranan perempuan saat ini diarahkan pada kesetaraan gender dalam kesempatan pengembangan diri. Oleh karenanya, program inti pembangunan peranan perempuan pada tahun 2002 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga-lembaga Formal dan Non Formal Organisasi Perempuan.

Indikasi Kegiatan :

1. Optimalisasi dan sosialisasi pengertian kesetaraan gender di masyarakat;
2. Penyusunan data dasar tentang kondisi dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan;
3. Pengembangan kelembagaan dan kualitas organisasi perempuan;
4. Pembinaan bagi remaja putri dalam kerangka pembentukan diri sebagai generasi penerus;
5. Pembinaan kemampuan dan keterampilan perempuan di berbagai bidang;
6. Pengembangan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional;
7. Pembinaan kemitraan yang sinergis dengan organisasi perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
8. Perlindungan hukum bagi perempuan;

b. Program Penegakkan Hak dan Kewajiban Perempuan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penempatan perempuan pada struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek-aspek keluarga dan individu;
2. Peningkatan kemitraan yang sinergis dengan organisasi-organisasi perempuan;
3. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI);
4. Pembinaan Program P2W-KS;
5. Pembinaan peran serta perempuan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

3.3.4 Pemuda dan Olahraga

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor pemuda dan olah raga pada tahun 2002 ini adalah : (1) terbentuknya generasi muda yang mandiri dan produktif; dan (2) tumbuh dan berkembangnya olahraga prestasi dan olahraga tradisional yang menunjang nilai-nilai sportivitas. Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, maka program pembangunan yang harus dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2002 adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Pemuda.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembinaan dan peningkatan peranan pemuda;
2. Penyaluran kreativitas dan aspirasi pemuda secara konstruktif;
3. Perluasan kesempatan sebesar-besarnya bagi pemuda untuk berlatih memimpin dan berwirausaha;
4. Peningkatan kepedulian dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan;
5. Pengembangan jaringan kerjasama nasional dan internasional;
6. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta advokasi bagi pemuda;
7. Peningkatan peran aktif pemuda dalam penanggulangan masalah NAPZA dan kriminalitas;
8. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan sistem pembinaan dan manajemen pengembangan prestasi olahraga;
2. Pengembangan pendidikan olahraga jasmani dan olahraga prestasi di lingkungan sekolah;
3. Peningkatan peran dan fungsi SD IPPOR;
4. Peningkatan jumlah bibit olahragawan berbakat termasuk penyandang cacat;
5. Peningkatan jumlah dan kualitas pembinaan olahragawan pelajar;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.

c. Program Peningkatan Kemitraan dengan Cabang-cabang Olah Raga di Daerah dalam rangka mengembangkan sikap kemandirian dan kemampuan profesioalisme.

Indikasi Kegiatan :

Pengembangan kerjasama kemitraan antara cabang-cabang olahraga dengan masyarakat dan pengusaha.

3.4. Penataan Kota

Salah satu persoalan yang paling sulit dan berdampak sangat luas bagi pertumbuhan Kota Bandung adalah bidang penataan kota. Kota Bandung sebagai etalase Jawa Barat dan pusat kegiatan primer serta sekunder di Jawa Barat dan Nasional memiliki tantangan yang demikian besar. Tantangan yang besar ini pada dasarnya berawal dari semakin tingginya kesenjangan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan penggunaannya di lapangan.

Dikaitkan dengan Visi Kota Bandung sebagai kota jasa yang “*Genah, Merenah, Tumaninah*” tidak hanya mengandung konsekuensi pemberian pelayanan yang serba prima, tetapi memberikan pemandangan alam kota yang tertib dan asri merupakan pekerjaan yang berat bagi Pemerintah Kota Bandung.

Pokok permasalahan dalam penataan Kota Bandung pada umumnya bertumpu pada terjadinya kesenjangan (*mis-match*) antara penggunaan lahan yang terjadi dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Masalah ini telah mengakibatkan semakin rendahnya kinerja infrastruktur kota dan menurunnya kualitas lingkungan hidup kota.

Untuk menanggulangi permasalahan penataan ruang yang terjadi selama ini, dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004 memiliki sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

- (1) Terbentuknya kawasan inti pusat sekunder Bandung Timur;
- (2) Tersedianya pedoman penataan kota yang komprehensif dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- (3) Tersedianya infrastruktur yang memadai baik dari segi mutu maupun jumlahnya;
- (4) Terbentuknya lingkungan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup perkotaan.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut pada Tahun 2004, maka program-program yang dijabarkan harus memiliki indikasi kegiatan yang langsung mengarah pada pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, program-program dan indikasi kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengembangan Sentra Perdagangan dan Jasa Kawasan Bandung Timur.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kawasan Bandung Timur;
2. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota.

b. Program Pengaturan dan Penataan Jenis-jenis Angkutan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan pola trayek mobil penumpang angkutan umum;
2. Penataan perbaikan dan pemeliharaan terminal, sub terminal, peralatan pengujian kendaraan.

c. Program Sinkronisasi Moda Angkutan Perkotaan.

Indikasi Kegiatan :

1. Sosialisasi peremajaan taksi angkutan kota, serta penyuluhan disiplin lalu lintas;
2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang usia operasional taksi dan ijin operasional taksi, serta penerapan aspek usia pakai/operasional kendaraan umum.

d. Program Revitalisasi Rambu-rambu Lalulintas.

Indikasi Kegiatan :

1. Kajian penanganan *traffic jam* di persimpangan, study lalu lintas dan operasional ATCS;
2. Penanganan permasalahan perparkiran;
3. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan (Marka, Rambu, RPPJ).

e. Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Kota..

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten Bandung;
2. Peningkatan koordinasi tata ruang dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya;
3. Pengembangan dan revitalisasi kawasan perkotaan dan permukiman/perumahan;
4. Penyediaan dan pengamanan lahan fasos – fasum;
5. Perencanaan system drainase/pengairan terpadu.

f. Program Penataan Kawasan dan Penghijauan Bandung Utara dalam rangka Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian banjir;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat;

3. Peningkatan penghijauan dan pengendalian pembangunan di kawasan Bandung Utara terutama kawasan konservasi air;
4. Pengembangan kerjasama penghijauan dengan masyarakat;
5. Pengamanan kawasan sumber mata air dan sungai.

g. Program Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kota Khususnya Kawasan Bandung Timur dan kawasan Bandung Utara.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas dan penyediaan jalan kolektor/jalan lingkungan;
2. Perbaikan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, dan utilitas kota.

h. Program Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Prosedur Manajemen Tata Ruang Kota.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengkajian sistem dan prosedur manajemen penataan ruang kota;
2. Penyempurnaan pedoman perencanaan dan pemanfaatan ruang kota (Perda RTRWK);
3. Evaluasi dan penyusunan pedoman perencanaan detail dan teknis ruang kota (penjabaran RTRWK).

i. Program Sosialisasi RTRWK sebagai Peraturan Daerah.

Indikasi Kegiatan :

Sosialisasi pedoman perencanaan penataan ruang kota (Perda RTRWK).

j. Program Pemanfaatan dan Rehabilitasi Lahan serta Pemulihan Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas udara dan air bersih;
2. Pengembangan fungsi dan ketersediaan RTH/Hutan Kota;
3. Peningkatan pemeliharaan pengamanan dan pelestarian sumberdaya air;
4. Pengendalian pembangunan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pada kawasan konservasi.

k. Program Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan pengendalian dampak lingkungan terhadap kegiatan yang memalsukan AMDAL;
2. Pengembangan teknologi dan peralatan penanggulangan limbah cair dan padat;
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penanggulangan pencemaran.

l. Program Penanggulangan Masalah Kebersihan dan Persampahan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas pelayanan kebersihan kota dan penanggulangan sampah kota;
2. Peningkatan kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam penanggulangan sampah;
3. Peningkatan pelayanan air bersih dan pelayanan pembuangan air kotor.

m. Program Penataan Kembali dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau melalui Kegiatan Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan penyuluhan dan pembinaan pengelolaan RTH/Hutan Kota;
2. Pengamanan dan pengembalian fungsi RTH yang telah berubah penggunaannya;

3. Peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH/hutan kota;
4. Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumur resapan.

n. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota;
2. Peningkatan peran lembaga koordinasi dalam pengelolaan dan penataan ruang kota;
3. Peningkatan administrasi pertanahan.

3.5. Pemerintahan Kota

Paradigma baru pemerintahan sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konstelasi adanya pola kemitraan yang nyata antara pemerintah dengan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang memiliki tujuan akhir terwujudnya *Good Governance*.

Optimalisasi peranan administrasi publik sama pentingnya dengan peranan mekanisme pasar, karena akan dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prasyarat yang harus dilakukan untuk mewujudkan konsepsi *Good Governance* adalah adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan, transparansi, keterbukaan, dan kepastian aturan hukum. Pertanyaan besar yang harus dijawab dalam konteks *Good Governance* tersebut adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bijaksana dengan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Dalam mengarahkan setiap gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan kota sebagaimana yang diamanatkan baik dalam Pola Dasar maupun Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004, beberapa sasaran pokok yang telah ditetapkan dan harus dicapai yaitu :

- (1) Terciptanya dan berfungsinya tatanan politik yang konstitusional berdasarkan demokrasi yang sejati dan dinamis;
- (2) Terwujudnya aparatur yang profesional, cakap, dan terampil sehingga secara target dapat meningkatkan pelayanan publik dan *Good Governance*.

Sasaran tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap program-program yang harus dijabarkan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka improvisasi dan apresiasi terhadap program yang dijalankan harus dapat ditunjukkan dengan indikator-indikator kegiatan dalam setiap program. Oleh karena itu, program-program dan indikasi kegiatan dalam pembangunan bidang Pemerintahan Kota pada Tahun 2002 mencakup program-program sebagai berikut :

3.5.1. H u k u m

a. Program Peningkatan Kesadaran, Kepastian, dan Penegakan Hukum, serta pemberian sanksi yang tegas.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyuluhan hukum;
2. Pemberlakuan *Rewards and Punishment* yang tegas dan penerapan prinsip *Incentive and Disincentive*.

b. Program Peningkatan Diseminasi dan Sosialisasi untuk terwujudnya kesadaran hukum.

Indikasi Kegiatan :

Sosialisasi produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Program Inventarisasi dan Pengkajian Perundang-undangan serta produk-produk hukum Daerah.

Indikasi Kegiatan :

Identifikasi dan pengkajian produk-produk hukum daerah.

d. Program Penyusunan dan Penerbitan produk-produk hukum daerah yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan perlindungan HAM.

Indikasi Kegiatan :

Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum.

3.5.2. Politik

(1) Kelembagaan

Sasaran yang hendak dicapai dalam aspek kelembagaan pada tahun anggaran 2002 adalah terwujudnya kemitraan yang harmonis antara badan legislatif dengan eksekutif. Oleh karenanya, program pembangunan yang perlu dilaksanakan pada tahun anggaran 2002 adalah:

Program Peningkatan Hubungan Kerja dan Kinerja antara Eksekutif dengan Legislatif serta pemantapan penataan sistem kelembagaan dan kewenangan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemantapan SOTK baru sesuai dengan kewenangan dalam Otonomi Daerah;
2. Pemantapan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif;
3. Penanganan masalah secara terkoordinasi dan terintegrasi;
4. Pelaksanaan kemampuan dan profesionalisme tenaga kearsipan;
5. Pelaksanaan penarikan dan atau penyelamatan arsip in aktif dan statis;
6. Pemeliharaan dan penyusutan arsip;
7. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kearsipan;
8. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
9. Peningkatan daya guna dan hasil guna kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat;
10. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi unit organisasinya.

(2) Koordinasi

Sasaran yang ingin dicapai pembangunan pada aspek koordinasi pada tahun anggaran 2002 adalah terwujudnya kemitraan yang harmonis dalam penyelesaian masalah kota. Maka program yang perlu diselenggarakan pada tahun anggaran 2002 adalah :

Program Peningkatan Kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif dengan Pihak Ketiga.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Temu wicara, seminar, dan dialog antara legislatif, eksekutif dengan masyarakat.

- (3) Aparatur Pemerintah
Sasaran yang hendak dicapai pada pembangunan aspek aparatur pemerintah pada tahun anggaran 2002 adalah : (1) meningkatnya kemampuan aparatur dan optimalisasi pelayanan; dan (2) meningkatnya penghargaan dan kesejahteraan kepada para pegawai. Maka program pembangunan yang perlu dilaksanakan pada tahun anggaran 2002 adalah :

a. Program Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum;
2. Peningkatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI);
3. Peningkatan penyelenggaraan Diklat;
4. Pembinaan mental dan disiplin pegawai;
5. Penerapan pemberian insentif dan hukuman secara tegas dan konsekuen.

b. Program Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Pegawai melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kelayakan dan kepatutan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembinaan mental dan disiplin pegawai.
2. Penerapan pemberian insentif dan hukuman secara tegas dan konsekuen terhadap pegawai;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian melalui sistem komputerisasi;
4. Peningkatan pengelolaan administrasi mutasi;
5. Penyusunan kriteria jabatan;
6. Penyusunan pola karier pegawai;
7. Penyusunan perencanaan jabatan;
8. Sosialisasi dan pendataan serta informasi penyusunan pegawai.

- (4) Kehidupan Politik

Sasaran yang hendak dicapai pada pembangunan aspek kehidupan politik pada tahun anggaran 2002 adalah : (1) terwujudnya tatanan politik yang kondusif dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat; dan (2) terwujudnya transparansi politik melalui pola komunikasi yang efektif dan efisien dalam rencana dan perencanaan program pemerintah. Maka program pembangunan yang perlu diselenggarakan pada tahun anggaran 2002 adalah:

a. Program Penyusunan Konsep Reformasi Politik dan Strategi Implementasinya.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan konsep reformasi politik dan strategi;
2. Peningkatan peranan pemerintah yang bersifat netral dan terbuka serta sebagai fasilitator dan monivator;
3. Peningkatan kemitraan pemerintah dengan pers;
4. Pengkajian, penelaahan, dan penyempurnaan konsep reformasi politik dan strategi implementasinya secara lebih demokratis dan transparan.

b. Program Peningkatan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sistem Politik.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan politik;
2. Rekayasa sistem politik secara lebih demokratis dan transparan yang dilandasi oleh ketaatan terhadap nilai-nilai moral dan etika politik yang tinggi.

c. Peningkatan Peran Pemerintah yang bersifat netral dan terbuka serta sebagai fasilitator dan motivator.

Indikasi Kegiatan :

Pemahaman pegawai terhadap mekanisme dan sistem kehidupan politik.

d. Penyempurnaan Mekanisme Kerja Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan.

Indikasi Kegiatan :

1. *Review* terhadap mekanisme kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan;
2. Pengkajian terhadap kemampuan aparatur perencana, pelaksana, dan pengendalian pembangunan;
3. Penyusunan mekanisme kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara lebih aspiratif, demokratis, dan transparan.

e. Peningkatan Kemitraan Pemerintah dengan Pers.

Indikasi Kegiatan :

Peningkatan kesempatan sebesar-besarnya kepada insan pers dalam meliputi berbagai aktivitas dan proses pembangunan secara lebih bertanggung jawab.

3.6 Pembiayaan

Masalah klasik yang umum dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah adalah ketersediaan sumber-sumber keuangan yang senantiasa terbatas dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Kenyataan tersebut mangisyaratkan bahwa persoalan keuangan kota harus selalu dipikirkan, karena aspek keuangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengaktualisasikan berbagai program pembangunan kota, serta menjadi faktor pendukung bagi upaya peningkatan kinerja pemerintah dalam pelayanan masyarakat.

Walaupun dari segi pendapatan asli daerah Kota Bandung berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Barat, namun dengan dilaksanakannya kewenangan-kewenangan Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, penerimaan asli daerah (PAD) Kota Bandung harus terus dipacu hingga mencapai titik yang paling aman. Untuk itu perlu adanya peningkatan kinerja unit-unit kerja penghasil dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan upaya efisiensi dalam penggunaan biaya-biaya pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada aspek pembiayaan Kota Bandung sebagaimana ditegaskan dalam Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004 adalah sebagai berikut :

- (1) Tertatanya sistem manajemen pengelolaan keuangan;
- (2) Meningkatnya PAD sesuai dengan potensi yang tersedia;
- (3) Tercapainya penghematan (efisiensi) terutama pada sektor-sektor yang memiliki tingkat *multiplier effect* rendah;
- (4) Terwujudnya sistem informasi pembiayaan baik swasta maupun pemerintah; dan
- (5) Tersusunnya produk-produk hukum dalam masalah keuangan.

Sementara itu, sasaran antara yang hendak dicapai dalam pembangunan aspek pembiayaan pada tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan kota;
- (2) Meningkatnya peran serta swasta dalam pembangunan kota;
- (3) Penggunaan APBD yang efisien dan terukur;
- (4) Terlaksananya intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka program-program pembangunan yang harus dilaksanakan selama Tahun 2002 dan indikasi kegiatan yang harus terkandung dalam setiap kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan Sosialisasi pembiayaan pembangunan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan kondisi pembiayaan pembangunan kota Bandung;
2. *Public Sharing* mengenai sumber-sumber potensi PAD dan mekanisme penggaliannya.

b. Program Peningkatan Peran serta Swasta dalam pembanguna dan penyempurnaan sistem dan proses kegiatan usaha.

Indikasi Kegiatan :

1. Identifikasi dan pengkajian target pajak, retribusi, dan sumber penerimaan lainnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pembaharuan sistem dan prosedur usaha yang saling menguntungkan.

c. Program Pengembangan SDM Pemerintah Kota Bandung dalam Menyusun Program Anggaran.

Indikasi Kegiatan :

1. Identifikasi dan pengkajian kemampuan aparatur dalam mengelola dan menggali sumber-sumber anggaran;
2. Peningkatan kemampuan SDM aparatur dalam menyusun anggaran pembangunan;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

d. Program Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kinerja BUMD;
2. Identifikasi dan pengembangan jenis kegiatan usaha BUMD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Perubahan manajemen pembangunan merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari pada setiap tahunnya, sejalan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini sejalan pula dengan tuntutan pembaharuan administrasi pembangunan menuju pelayanan yang prima dan pendayagunaan anggaran secara efisien dan efektif, yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan paradigma pembangunan menuntut adanya perubahan peran pemerintah dari pelaksana menjadi fasilitator, memberi instruksi menjadi melayani masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan, dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi. Dengan demikian, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, sampai dengan tahap evaluasi harus mengalami perubahan dalam mekanismenya.

4.1. Prinsip Dasar Pelaksanaan

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi pada perwujudan “*Good Governance*”, maka pelaksanaan pembangunan Kota harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) **Akuntabel**, yaitu setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap pejabat atau aparatur pemerintah kepada pihak masyarakat atas kinerja pencapaian tujuan atau sasaran tertentu yang telah dilaksanakan. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam prinsip akuntabilitas ini yaitu :
 - a. Kinerja pencapaian hasil dibandingkan target atau sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber.
 - c. Kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan mandat atau tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kepuasan masyarakat atas tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) **Transparan**, yaitu setiap kebijakan, sumber-sumber yang digunakan untuk setiap program/kegiatan harus secara mudah dapat dilihat dan diketahui oleh seluruh komponen organisasi yang ada disekitarnya dan masyarakat.
- (3) **Demokratis**, yaitu setiap pengelola program harus mampu bersikap aspiratif dan akomodatif terhadap setiap masukan yang disampaikan oleh pihak eksternal. Keputusan yang diambil harus mencerminkan asas demokrasi.
- (4) **Partisipatif**, yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan harus mampu melibatkan sebesar-besarnya potensi masyarakat dan swasta, serta dapat menjamin terpeliharanya hasil-hasil program/kegiatan oleh masyarakat.

- (5) **Efisien**, yaitu setiap pengeluaran dan penggunaan sumber-sumber harus diperhitungkan secara cermat, tepat, dan proporsional dengan menerapkan konsep *incentive and disincentive* (yang bekerja/bermanfaat adalah yang dibayar), serta mencegah terjadinya praktek penggunaan sumber-sumber yang tidak perlu dan kebocoran-kebocoran.
- (6) **Efektif**, yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat diselesaikan secara cepat dan tepat dengan perencanaan strategis yang matang, dan terjamin kesinambungannya.

4.2. Manajemen Pelaksanaan Pembangunan

a. *Perencanaan*

Perencanaan disusun secara komprehensif dan konsisten serta mengacu kepada konsepsi bottom up planning, yakni bahwa keputusan yang diambil harus mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara demokratis melalui pelibatan berbagai kelembagaan Sosial Politik, Sosial Ekonomi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Tokoh Masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui forum dialog, yang hasilnya kemudian dikaji secara mendalam oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Produk perencanaan yang telah tersusun harus menyertakan rincian indikator kinerja setiap program pembangunan, agar pada gilirannya tingkat keberhasilan setiap program pembangunan dapat diukur.

Produk perencanaan harus mencerminkan keterpaduan program yang sinergis dan berorientasi pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang harus dijadikan pegangan bagi perangkat daerah dan komponen-komponen pelaku pembangunan lainnya.

b. *Pelaksanaan*

Pelaksanaan pembangunan daerah yang telah didesentralisasikan kepada Daerah pada tingkat implementasinya mutlak harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Paradigma baru dalam pembangunan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, sehingga dari pihak pemerintah perlu segera melakukan reposisi yang semula berada pada posisi pelaksana beralih dan mengambil posisi sebagai fasilitator.

c. *Pengendalian dan Pengawasan*

Pengendalian dan pengawasan terhadap proses pembangunan dilakukan secara fungsional oleh Badan Pengawasan dengan membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk turut mengawasi dan mengendalikan secara proporsional dan menurut peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung telah menyiapkan wadah dan saluran bagi seluruh masyarakat untuk memberikan masukan/informasi hasil pengawasan masyarakat untuk segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah. Penerapan asas *Rewards and Punishment* harus ditegakkan guna mendorong terwujudnya *Clean Government*.

d. Evaluasi

Evaluasi pembangunan dilakukan dalam kerangka pengukuran kinerja pembangunan sebagai dasar bagi penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Dalam paradigma baru pembangunan, pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kehadiran berbagai potensi kelembagaan diluar institusi birokrasi dalam proses evaluasi pembangunan merupakan suatu hal yang sangat realistis dan menguntungkan bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

4.3. Rambu-rambu Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan Tahun 2002

Pembiayaan pembangunan khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembiayaan program lebih diarahkan untuk menangani kegiatan yang berimplikasi langsung pada pengadaan/peningkatan produktivitas kota;
- b. Pembiayaan program lebih diarahkan pada upaya peningkatan produksi, distribusi, dan pelayanan (perbaiki sistem dan manajemen serta pembinaan profesionalisme);
- c. Pembiayaan program diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang dapat memulihkan (*recovering*) dan membangun kembali (*redeveloping*) roda perekonomian berskala kecil dan menengah;
- d. Pembiayaan pemberdayaan diarahkan pada penggalian potensi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestariannya;
- e. Pembiayaan pembangunan diarahkan untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Bandung;
- f. Pembiayaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan institusi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun Anggaran 2002, merupakan aktualisasi Otonomi Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan pelaksanaan lain yang menyertainya.

Selain mengacu kepada peraturan perundang-undangan diatas, Repetada ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2001, dan merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2002 ini harus dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan dalam penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2002, baik dalam lingkup program maupun proyek;
2. Sebagai pengikat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama;
3. Merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi masyarakat dalam rangka penyusunan rencana ini, serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan sangat diharapkan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

